

ANALISA

1985—9

**EMPAT PULUH TAHUN
INDONESIA MERDEKA:**

**IDEOLOGI, POLITIK
DAN EKONOMI**



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Clara JOEWONO
Kirdi DIPOYUDO
A. Sudiharto DJIWANDONO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Ronald NANGOI
S. TJOKROWARDOJO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Tanah Abang III/27,
Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534,
356535

ANALISA

TAHUN XIV, NO. 9, SEPTEMBER 1985

PENGANTAR REDAKSI	716
KESINAMBUNGAN, PENATAAN, DAN IDEOLOGI <i>A.M.W. PRANARKA</i>	719
MEMANTAPKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA <i>BABARI</i>	732
PEMBANGUNAN IDEOLOGI SELAMA ORDE BARU: PROBLEM DAN PROSPEKNYA <i>M. DJADIJONO</i>	749
MASALAH DAN PROSPEK KELEMBAGAAN DI BIDANG POLITIK <i>Sarwono KUSUMAATMADJA</i>	764
IKHTISAR MASALAH EKONOMI <i>Hadi SOESASTRO</i>	772
DALAM MASA PASCA-MINYAK HENDAKNYA DIPIKIRKAN KONSEP "FULL SERVICES" BANKING <i>J. PANGLAYKIM</i>	776

Pengantar Redaksi

Penerbitan ANALISA bulan Agustus yang lalu secara khusus menyoroti perihal politik luar negeri Indonesia selama kurun waktu empat puluh tahun Indonesia merdeka. Sebagai kelanjutan dan untuk melengkapi pembahasan-pembahasan tersebut maka dalam penerbitan ANALISA bulan September ini dikemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ideologi, politik dan ekonomi.

A.M.W. PRANARKA dalam tulisan pertama yang berjudul "Kesinambungan, Penataan, dan Ideologi" secara mendasar membahas pengertian dan pemahaman tentang ideologi. Berdasarkan pengertian dan pemahaman tersebut penulis antara lain secara lugas mengemukakan bahwa selama penciptaan kerangka landasan maupun sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, pembangunan ideologi tetap merupakan hal yang esensial. Dengan melakukan perbandingan dengan ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa lain penulis menunjukkan secara jelas Pancasila yang pada hakikatnya adalah rumusan dari ideologi, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah dan kebudayaan Indonesia. Sebagai kelanjutan dari analisa tersebut selanjutnya penulis mengemukakan berbagai masalah aktual ideologi kebangsaan kita, problem pengembangan serta berbagai kemungkinan problem di masa depan.

Kalau dalam artikel yang pertama A.M.W. Pranarka membahas perihal ideologi secara sangat mendasar, maka dalam tulisan kedua yang berjudul "Memantapkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara," BABARI dalam analisisnya mengemukakan bahwa usaha memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara semakin diperlukan. Kesimpulan seperti ini didasarkan atas keyakinan penulis bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara telah menjadi kesepakatan nasional, yang selayaknya ditaati demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa. Pancasila telah mampu memberikan harapan bagi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional maupun emosional. Namun mempertimbangkan hambatan, tantangan, ancaman, maupun gangguan yang dihadapi Pancasila di dalam proses perjalanannya, penulis menginginkan usaha pemantapan jangan sampai diabaikan.

Salah satu hal yang tampak secara jelas dan menonjol dalam masa Orde Baru adalah dilaksanakannya pembangunan ideologi. Dalam tulisannya yang

berjudul *"Pembangunan Ideologi Selama Orde Baru: Problem dan Prospeknya,"* M. DJADIJONO menyoroti langkah-langkah dan permasalahan yang dihadapi Orde Baru dalam usaha pembangunan ideologi. Dengan melakukan pengkajian tentang latar belakang perjuangan Orde Baru beserta eksponen-eksponennya, penulis ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah merupakan usaha yang sangat bermakna.

Jika di masa lalu kehidupan politik kita diwarnai dengan konflik politik dan krisis politik yang mencapai puncaknya pada saat meletusnya Pemberontakan G-30-S/PKI, maka dalam masa Orde Baru telah dicapai prestasi yang menggembirakan, yakni tertanamnya legitimasi kelembagaan politik Orde Baru baik supra maupun infrastrukturnya. Dalam tulisan keempat yang berjudul *"Masalah dan Prospek Kelembagaan di Bidang Politik,"* Sarwono KUSUMAATMADJA mengupas berbagai langkah serta suasana yang semakin melembagakan kehidupan politik di Indonesia. Menurut penulis, prospek ke arah majunya peranan kelembagaan politik kita akan senantiasa cerah dengan adanya komitmen yang teguh dari para penyelenggara negara untuk selalu mendekatkan diri pada cita-cita kemerdekaan bangsa. Di samping itu dikemukakan penataan kelembagaan di bidang politik hendaknya dilakukan dengan berdasar pada sikap keterbukaan dan kemampuan adaptasi yang moderat, serta yang terpenting bahwa langkah tersebut mampu dipahami oleh seluruh rakyat.

Selama empat puluh tahun Indonesia merdeka banyak hal yang dapat diungkapkan mengenai masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Karena tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka adalah tepat bila sekarang, dalam usia empat puluh tahun merdeka, kita lebih mencurahkan perhatian kepada usaha peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut. Dengan dasar pemikiran tersebut Hadi SOE-SASTRO secara ringkas dan jelas mengemukakan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam tulisannya yang berjudul *"Ikhtisar Masalah Ekonomi,"* penulis mengemukakan masalah-masalah inti melalui pendekatan tematik dan masalah-masalah tersebut disimpulkan berdasarkan pengkajian yang mendalam.

Dalam dua dekade terakhir ini, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia sangat banyak ditunjang oleh hasil yang diperoleh dari sektor minyak. Berkah minyak telah berakhir dan sekarang kita telah memasuki era pasca-minyak. Hal ini berarti bahwa masalah dana pembangunan dan/atau masalah perbankan dan lembaga keuangan perlu mendapat perhatian. Sehubungan dengan ini J. PANGLAYKIM dalam tulisannya yang berjudul, *"Dalam Masa Pasca-Minyak Hendaknya Dipikirkan Konsep 'Full Services'*

Banking,” mengemukakan bahwa Indonesia, mau tidak mau harus menyiapkan diri ke arah ”full services banking,” yang antara lain dengan menciptakan sarana bisnis yang lebih canggih dalam rangka melaksanakan strategi ekspor, yang sekarang ini telah merupakan suatu tuntutan yang perlu dilaksanakan. Untuk mencapai sasaran ekspor dengan jumlah tertentu dalam 20 sampai 25 tahun yang akan datang atau untuk menjamin penghasilan devisa demi kelangsungan pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional, maka kendala-kendala yang bersifat ekonomi, politik, dan sosiologis perlu diatasi. Secara singkat dapat dikatakan penulis menginginkan perlunya dilakukan pembaharuan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan perkembangan, dan khusus menyangkut perbankan penulis menginginkan agar perbankan dan lembaga-lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai akselerator dan pemain yang efektif dalam mewujudkan cita-cita bangsa khususnya dalam bidang ekonomi.

Penerbitan ANALISA bulan Agustus dan September ini seperti yang dimaksudkan dengan sengaja mengemukakan beberapa tema yang berkaitan dengan pembangunan nasional sesudah Indonesia berusia empat puluh tahun. Banyak masalah-masalah penting lainnya yang belum dikemukakan dan diharapkan akan dapat dikemukakan dalam penerbitan-penerbitan selanjutnya.

September 1985

REDAKSI

Kesinambungan, Penataan, dan Ideologi

A.M.W. PRANARKA

BATASAN PENGERTIAN

Ideologi adalah hal yang kompleks. Pengertiannya pun telah menjadi amat majemuk dan berbeda-beda: lain bagi de Tarcy lain pula bagi Napoleon; lain bagi Feuerbach lain lagi bagi Karl Marx ataupun Althuser; lain bagi kaum komunis lain lagi untuk kalangan Neo Marxis, dan berbeda pula bagi berbagai kalangan ilmiah dan akademik. Di dalam pengertian-pengertian itu terungkap bahwa ideologi mencakup di dalamnya dimensi kognitif manusia (dewasa ini ideologi lazim dipandang sebagai suatu *belief system*) mengandung unsur kepentingan, interest pamrih ataupun cita-cita (maka itu ideologi kadang-kadang digolongkan kepada pemikiran yang sifatnya pragmatik dan kadang-kadang manipulatif), dan terkait dengan aksi (maka ideologi dipandang bertalian dengan apa yang disebut ideo-praksis). Penggabungan secara komulatif dari aspek-aspek tersebut tidak jarang menimbulkan suatu pemahaman mengenai ideologi sebagai hal yang menyentuh komitmen yang sifatnya total. Namun dari lain pihak tidak jarang pula orang meninjau ideologi sebagai hal yang sifatnya parsial semata-mata. Tidaklah mengherankan apabila dewasa ini terdapat persepsi yang berbeda-beda pula mengenai ideologi itu: ada sementara kalangan yang memandang era ideologi telah mati dan karenanya tiada manfaat berpikir mengenai ideologi itu; sementara kalangan lain sibuk terlihat dengan usaha memacu ataupun menumbuhkan ideologi baru, baik yang bersifat keagamaan maupun yang jenisnya non-keagamaan. Pandangan yang mengatakan era ideologi telah mati itupun bahkan dipandang sebagai suatu bentuk ideologi pula

Ideologi makin pula dibedakan dari ilmu, filsafat, dan theologi, namun demikian ideologi menjadi membaur dengan semuanya: dengan ilmu, theologi, filsafat, dengan ekonomi, politik atau hukum, dengan kehidupan negara dan

perkembangan masyarakat, dengan kekuatan dan kekuasaan, dengan masa lampau, masa kini dan masa depan.

Ideologi sebagai kenyataan sejarah tampaknya tidak diingkari lagi. Dan ideologi itupun tampaknya harus dipahami sebagai bagian dari sejarah manusia yang sifatnya evolutif, majemuk. Semua itu pangkalnya adalah manusia: manusia yang berideologi, bernegara, bermasyarakat, beragama, mengembangkan pengetahuan, dan lain sebagainya.

Di Indonesia kata ideologi sudah lama lazim dipakai dan memang cukup memasyarakat pula. Di Indonesia kata ideologi mengandung di dalamnya arti sebagai "pedoman perjuangan," "pegangan perjuangan." Di dalamnya terkandung aspek ajaran atau doktrin (pengetahuan), dan terkait pula dengan aksi, pergerakan, kepentingan, dan cita-cita. Apa yang dinamakan ideologi nasional kita adalah pegangan perjuangan kebangsaan Indonesia.

TIPOLOGI IDEOLOGI

Ada manfaatnya kiranya menengok sejenak ke dalam tipologi ideologi-ideologi yang telah mempengaruhi ataupun membentuk perkembangan sejarah dunia sampai saat ini. Secara khusus di sini akan diperhatikan perkembangan ideologi-ideologi di Barat.

Di dalam bukunya tentang *Histoire des Ideologies* (Hachette, 1978), Francois Chatelet membagi pertumbuhan ideologi di Barat itu menjadi tiga periode, dan dituangkan ke dalam tiga jilid buku pula. Periode pertama meliputi perkembangan Eropa sampai dengan abad ke-8. Periode ini mencakup alam pikiran kosmologis purba, problematik politheisme dan monotheisme. Fase ini terkait dengan perkembangan pengaruh alam pikiran Yunani dan Romawi sampai dengan masuknya agama Nasrani. Buku kedua mencakup perkembangan Eropa dari abad ke-9 sampai abad ke-17, dan disebutnya sebagai periode gereja dan negara. Terkandung di dalam periode ini antara lain tumbuhnya ideologi keagamaan, problematik pengetahuan, kekuasaan dan kedaulatan. Sedang buku ketiga meliputi perkembangan Eropa dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, di mana dibicarakan berbagai jenis ideologi: ideologi pengetahuan, ideologi kekuasaan, ideologi kemajuan, ideologi kemanusiaan, ideologi penaklukan dan ideologi perang dan damai, yang mencakup di dalamnya pemikiran ideologis mengenai koeksistensi, pembebasan, konflik dan revolusi.

Seluruh proses tersebut tampaknya dapat dikembalikan kepada dua alam pikiran yang membentuk pertumbuhan kebudayaan dan peradaban Barat,

yaitu Hellenisme dan Semitisme. Dari dua alam pikiran tersebut telah tumbuh dua tipe ideologi dasar: ideologi tipe Hellenistik dan ideologi tipe Semitik.

Periode pertama dari Chatelet adalah babak pertumbuhannya ideologi Hellenistik sampai kepada pertemuannya dengan ideologi tipe Semitik. Periode kedua merupakan fase di mana Barat dikuasai oleh ideologi tipe Semitik. Periode ketiga merupakan kebangkitannya kembali ideologi tipe Hellenistik. Memang dua aliran utama itu sampai sekarang masih mempunyai aktualitasnya. Interaksi antara Hellenisme dan Semitisme merupakan kenyataan yang masih ikut membentuk situasi kebudayaan maupun kemasyarakatan di Barat, termasuk di dalamnya lahirnya ideologi-ideologi yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan dunia sampai saat ini. Tampaknya masyarakat Barat belum dapat menyelesaikan pergumulan antara Hellenisme dan Semitisme itu dalam suatu kedamaian yang kreatif.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kedua tipe alam pikiran itu mempunyai sifat yang sama: yaitu cenderung kepada *determinisme* dan *absolutisasi*. Perbedaan terletak antara lain di dalam dalil dasar berikut: Hellenisme berpangkal dari andalan "*It is man who creates God.*" Semitisme bertolak dari andalan "*It is God who creates man.*" Dalil yang tampaknya sederhana ini ternyata mempunyai implikasi konsepsional, institusional dan operasional yang amat majemuk. Yang satu menjadi sumber tumbuhnya sekularisme dan atheisme, yang lain menjadi sumber tumbuhnya theokratisme-keagamaan.

IDEOLOGI KEBANGSAAN INDONESIA SEBAGAI TIPE IDEOLOGI TERSENDIRI

Pancasila pada hakikatnya adalah rumus dari ideologi kebangsaan yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Kebangkitan nasional kiranya dapat disejajarkan dengan gerakan Aufklärung yang terjadi di Eropa beberapa abad yang lampau. Dari kebangkitan nasional (yang merupakan interaksi dari berbagai aliran) tumbuh ideologi kebangsaan sebagai ideologi yang mendamaikan, menyatukan, sehingga pergerakan kebangsaan Indonesia itu menjadi pergerakan yang *bhinneka tunggal ika*. Ideologi kebangsaan pada hakikatnya adalah cita-cita persatuan dan kesatuan kebangsaan yang tidak didasarkan kepada konotasi etnis, rasial, daerah, status sosial, kekuatan ekonomi, agama ataupun kepercayaan, namun dari lain pihak juga bukan persatuan-kesatuan yang bermaksud mematikan kenyataan etnis, rasial, daerah, mematikan agama-agama ataupun kepercayaan. Ideologi kebangsaan kita itu melihat adanya interelasi dari kenyataan yang divergen dan majemuk, dan karena itu ditumbuhkanlah titik temu yang menyatukan dan mendamaikan.

Ideologi kebangsaan Indonesia tidak merupakan sub-sistem dari ideologi tipe Hellenistik (sekularisme, atheisme), tidak pula merupakan sub-sistem dari ideologi tipe Semitik (theokratisme-keagamaan). Dengan bahasa sekarang mungkin dapat disebutkan bahwa ideologi kebangsaan kita merupakan alternatif bagi ideologi tipe Semitik maupun ideologi tipe Hellenistik. Di dalam alam pikiran kebangsaan kita itu imanensi diakui, akan tetapi tidak dimutlakkan, sementara transendensi diterima akan tetapi tidak dijabarkan. Di balik semuanya itu tentu saja ada perbedaan yang lebih mendasar antara *Weltanschauung Indonesia* di satu pihak dengan alam pikiran Hellenistik ataupun alam pikiran Semitik di lain pihak. Yang satu mengandung *relativeeringsvermogens* yang amat tinggi, sedang kedua lainnya didorong oleh gerak determinisme dan absolutisasi yang berkadar tinggi.

Memang harus disadari pula bahwa tumbuhnya ideologi kebangsaan Indonesia itu dipacu dan dibentuk oleh interaksinya alam pikiran Indonesia dengan pengaruh Hellenisme maupun pengaruh Semitisme, di mana terjadi proses akulturasi.

IDEOLOGI KEBANGSAAN KITA DAN BERBAGAI PROBLEM AKTUALNYA

Pancasila dan Problem Kontinuitas (Kesinambungan)

Problem kesinambungan adalah problem sejarah. Di dalam sejarah terdapat perubahan akan tetapi juga terdapat kontinuitas. Sejarah sebagai pengalaman dasar manusia adalah perpaduan dan tegangan yang terus-menerus antara perubahan dan kesinambungan. Tampaknya pertanyaan yang dogmatik dilematik untuk membuat pilihan antara "kontinuitas" atau "diskontinuitas" semakin dirasa sebagai pseudo-problem, walaupun di dalam perancangan politik problematik seperti ini justru tidak jarang ditampilkan sebagai tantangan. Kesadaran juga semakin tinggi bahwa sejarah merupakan pengalaman dasar manusia, di mana di dalamnya terdapat kesinambungan tidak saja yang sifatnya individual akan tetapi juga yang sifatnya kolektif, yaitu kesinambungan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan bahkan umat manusia.

Berkenaan dengan sejarah perlu dikemukakan catatan bahwa semua ideologi (terutama yang tumbuh dari alam pikiran Hellenistik dan alam pikiran Semitik di Barat) mengandung di dalamnya usaha dan pretensi untuk memberi "arah dan bentuk" kepada sejarah. Di dalam ideologi itu terdapat unsur *Futurisme-deterministik*, terkandung di dalamnya andalan keyakinan

untuk dapat mewujudkan "masyarakat dan sejarah yang sempurna." Di dalam *De Civitate Dei*-nya Agustinus dan di dalam ajaran Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Agama antara lain dari von Sthal misalnya, terkandung futurisme deterministik tipe Semitik. Di dalam ajaran Hegel, Marx, Nietzsche dan beberapa gagasan Neo-Marxis terkandung di dalamnya futurisme deterministik tipe Hellenistik. Pengalaman sejarah manusia tampaknya makin memudahkan ideologi-ideologi yang mengandung di dalamnya "janji" yang mengandalkan futurisme deterministik untuk mewujudkan masyarakat yang sempurna. Ideologi Hellenis yang menawarkan pembangunan dunia manusia sempurna berdasarkan kepada ilmu pengetahuan misalnya mengandung di dalamnya kontradiksi terhadap kenyataan sejarah yang bagaimanapun akan selalu berada di dalam keterbatasan-keterbatasan. Ideologi Semitik yang menjanjikan pembangunan dunia sempurna abadi berdasarkan kepada ajaran keagamaan sebagai wahyu Tuhan yang sempurna abadi bagi seluruh umat manusia di dunia dan segala jaman untuk dijadikan pedoman hidup perseorangan maupun kenegaraan dan kemasyarakatan sempurna dunia akhirat tampaknya juga dihadapkan kepada kontradiksi berdasarkan kepada kenyataan sejarah, di mana manusia dihadapkan kepada kenyataan adanya perbedaan yang amat hakiki: antara Tuhan Yang Maha Sempurna dan agama yang di dalamnya terkandung unsur manusiawi yang terbatas. Memaksakan ideologi-ideologi seperti itu secara keras, hanya akan membawa kepada titik absurditas.

Berbeda dengan ideologi tipe Hellenistik ataupun ideologi tipe Semitik, Pancasila (ideologi kebangsaan kita, *weltanschauung* Indonesia) tampaknya kurang menunjukkan adanya implikasi futuristik yang jelas dan tegas. Bahkan kadang-kadang dipandang sebagai ideologi yang statis, tidak progresif. Apabila kita sadari bahwa Pancasila (ideologi kebangsaan) adalah pegangan *perjuangan* kebangsaan kita, maka jelas sekali bahwa di dalamnya terkandung dimensi "pergerakan" dimensi "perjalanan kebangsaan," karena itu juga dimensi sejarah kedepan di dalamnya. Dari lain pihak memang jelas bahwa Pancasila tidak mengandung pesan futurisme-deterministik (karena alam pikiran Indonesia justru bersifat non-deterministik). Mengenai sejarah itu pesan ideologi kebangsaan kita dapat dirumuskan sebagai berikut: di dalam perjuangannya mengarungi jalannya sejarah, bangsa Indonesia hendaknya selalu berpegang kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin Ki Hadjar Dewantara-lah yang secara dini telah berusaha memberikan pendalaman dan kedalaman reflektif-intelektual atas ajaran Pancasila seperti itu: Tuhan, telah menciptakan kodrat manusia, dan manusia harus mengembangkan hidup, kehidupan dan penghidupannya di dunia ini sesuai dengan kodratnya itu sebagai kenyataan yang evolutif, bergerak, hidup; kebangsaan Indonesia adalah alam

kodratnya rakyat Indonesia, yang juga merupakan bagian dari alam kodratnya kemanusiaan; perjalanan kehidupan kebangsaan adalah perjalanan kehidupan yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia sebagai kodrat alamnya bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila itu, menurut Ki Hadjar terkandung ajaran keluhuran kemanusiaan ini. Dengan perkataan lain: terhadap sejarah sebagai gerak dan proses ideologi kebangsaan kita mengajarkan untuk mengarungi jalannya sejarah itu secara *berkebudayaan*, yaitu sesuai dengan kodrat kemanusiaan dan kodrat kebangsaan Indonesia.

Problem kesinambungan dapat muncul sebagai problem politik terutama di dalam fase transisi, di mana seolah-olah masyarakat dihadapkan kepada pilihan "between two worlds: one dead while the other is difficult to be born." Situasi seperti ini tidak jarang diwarnai oleh munculnya pikiran tentang *diskontinuitas sebagai alternatif satu-satunya* dan bersama dengan itu dimunculkan pula ideologi *alternatif tertentu*. Fase transisi seperti sekarang ini memang sebaiknya dijadikan fase refleksi ideologis: Pertanyaan yang harus dijawab adalah: siapakah yang sudah menjalani sejarah selama empat puluh tahun yang silam ini? Siapakah yang akan mengarungi sejarah empat puluh tahun, seratus tahun di masa yang akan datang nanti? Masih samakah subyek yang menjalani "lakon sejarah" tersebut? Ke mana dan untuk apa perjalanan sejarah ini?

Apabila kita berpegang kepada ideologi kebangsaan kita maka jawabnya adalah: baik perjalanan empat puluh tahun yang telah lalu maupun perjalanan empat puluh tahun yang akan datang, keduanya adalah merupakan perjalanan rakyat Indonesia yang telah disatukan dalam satu cita-cita kebangsaan, satu perjuangan kebangsaan, memiliki satu ideologi kebangsaan, hidup dalam satu negara kebangsaan didasarkan atas satu konstitusi kebangsaan pula. Dengan demikian sejarah tersebut pada hakikatnya masih merupakan "satu sejarah" yaitu sejarahnya bangsa Indonesia: hanya saja konteks dan tantangannya berbeda. Perjalanan itu adalah perjalanan pergerakan perjuangannya bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang bersatu merdeka dan berdaulat.

Pancasila dan Jalur Pelembagaan (Problem Penataan)

Pancasila sebagai ideologi kebangsaan telah memberi arah dan memberi bentuk atas sejarah Indonesia. Di dalam perkembangan terakhir ini Pancasila dinyatakan sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pancasila telah memberi kemantapan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, di lain pihak Pancasila telah pula dimantapkan di dalam proses kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita itu. Di dalam proses ini

memang tidak jarang terjadi konflik-konflik. Di sini *principium identitatis* berjalan bergandengan dengan *principium negationis*: identitas Pancasila sebagai ideologi kebangsaan menjadi semakin tumbuh dan kentara di dalam interaksinya dengan berbagai ideologi lainnya. Semua ini mungkin harus dipandang sebagai perjalanannya bangsa Indonesia untuk semakin menjadi "bangsa Indonesia," baik dalam pengertian kuantitatif maupun dalam pengertian kualitatifnya.

Terjadi jalinan resiprokal antara pendalaman pemahaman ideologi kebangsaan di satu pihak dengan pemantapan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di lain pihak. Di sini ideologi kebangsaan menjalani proses eksplisitasi dan menemukan wujud institusionalisasinya.

Tumbuhnya institusionalisasi ideologi kebangsaan dapat membawa serta suatu permasalahan. Di dalam empat puluh tahun perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat ini, institusionalisasi Pancasila sebagai ideologi kebangsaan terjadi terutama di dalam jalur kenegaraan dan jalur pemerintahan. Hal ini tidaklah mengherankan disebabkan karena di dalam empat puluh tahun perjalanan di masa yang silam ini bidang kenegaraan dan bidang pemerintahan ternyata telah menjadi ajang dan sasaran utama dari percaturan dan pertarungan ideologis-politis dalam rangka merebut kekuasaan atas kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Tanpa mengetahui latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan mudah orang terjerumus kepada suatu prasangka bahwa Pancasila sebagai ideologi ini adalah manipulasi politik dari Orde Baru khususnya militer dalam rangka merebut dan mempertahankan kekuasaannya atas kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka proses institusionalisasi ideologi kebangsaan yang terjadi di jalur kenegaraan dan pemerintahan itu pun tidak jarang ditafsirkan sebagai bagian dari manipulasi politik seperti itu, di mana diusahakan proses konsentrasi kekuatan dan kekuasaan (ideologi, birokrasi, militer) ke dalam struktur yang menjadi tertutup dan totaliter. Pandangan seperti ini tentulah tidak mengungkapkan kenyataan sejarah kebangsaan kita dan merupakan suatu generalisasi yang dipaksakan berdasarkan patron teoretik tertentu atas kehidupan bangsa dan negara kita secara deterministik dan apriori.

Namun demikian bahwa ideologi kebangsaan itu menemukan institusionalisasinya terutama di jalur formal kenegaraan dan pemerintahan memang perlu pula dijaga agar tidak terjadi proses birokratisasi dinamika ideologi kebangsaan kita itu.

Perlu disadari bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya haruslah ditujukan kepada terwujudnya ketahanan rakyat, ketahanan masyarakat, yang menjadi sumber lahir dan tumbuhnya pemerintahan ataupun institusi-institusi

kenegaraan lainnya. Ini berarti bahwa dinamika kehidupan kebangsaan itu harus menemukan perwujudannya pula di dalam tumbuh dan berkembangnya dinamika kemasyarakatan. Masyarakat harus merupakan pendukung original dan kreatif dari ideologi kebangsaan itu. Di sinilah hikmah dari pemikiran menegaskan Pancasila menjadi satu-satunya asas kehidupan berbangsa-bernegara dan bermasyarakat bagi organisasi kemasyarakatan. Dinamika masyarakat itu menemukan jalur institusionalisasinya melalui organisasi kemasyarakatan. Dinamika ini perlu sekali tumbuh sebagai basis pembangunan kehidupan bangsa dan negara, tetapi ini mengandung pula suatu pengertian bahwa dinamika tersebut perlu pula dipadukan dalam satu acuan nasional, sehingga akan terjadilah proses banggunya kekuatan masyarakat secara bhinneka tunggal ika.

Di samping itu perlu sekali disadari bahwa Pancasila sebagai ideologi mempunyai akarnya di dalam sifat pergerakan kerakyatan. Maka itu ideologi kebangsaan tersebut perlu sekali dihayati dan diamalkan di dalam suasana pergerakan kerakyatannya bangsa Indonesia. Pola pergerakan inilah kiranya hal yang perlu sekali dipelajari dan diperhatikan, sebab mungkin sekali keberhasilan kita di dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang harus pula melalui jalur pergerakan seperti itu.

Tentu saja menumbuhkan proses pergerakan di dalam perjalanan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat Indonesia ini tidak harus diartikan bahwa pemerintah dengan demikian harus dikurangi kekuatannya. Kita memerlukan pemerintahan yang kuat. Tetapi kita juga memerlukan tumbuhnya pergerakan kemasyarakatan yang kuat pula. Keduanya tidak merupakan kubu yang antagonistik, sebaliknya keduanya merupakan saudara kembar yang membentuk kekuatan kehidupan bangsa dan negara kita. Penyelenggara negara bukanlah hanya pemerintah semata-mata. Masyarakat juga merupakan penyelenggara negara. Inilah artinya apabila negara kebangsaan kita itu dinyatakan sebagai negara yang berkedaulatan rakyat.

Perkembangan ideologi kebangsaan di masa mendatang dengan demikian memerlukan peranan besar dari pusat-pusat pergerakan kemasyarakatan di Indonesia ini. Oleh karena itu tumbuhnya kreativitas dari pusat-pusat pergerakan kemasyarakatan itu adalah amat penting, baik ditinjau dari segi ideologis maupun ditinjau dari urgensi tumbuhnya fungsionalisme dan profesionalisme di dalam kehidupan kebangsaan kita. Tentu tumbuhnya kreativitas melulu masih belum mencukupi. Tumbuhnya potensi kreatif di dalam pergerakan kemasyarakatan itu perlu disertai pula dengan pendalaman reflektif atas nilai-nilai kebangsaan pula.

Dengan perkataan lain tumbuhnya ideologi kebangsaan melalui pergerakan kemasyarakatan memerlukan terjadinya proses kebangkitan kebuda-

ayaan kebangsaan Indonesia. Pusat-pusat pergerakan dalam arti pusat kepemimpinan, pembentuk nilai dan sikap hidup (pembentuk pandangan dan wawasan) perlu tumbuh sebagai bagian dari prosesnya bangsa Indonesia semakin menjadi "bangsa Indonesia." Pusat-pusat pergerakan kemasyarakatan di bidang pertumbuhan ekonomi juga amat diperlukan. Pendidikan merupakan wahana yang amat penting. Demikian pula pusat-pusat perguruan swasta seperti misalnya bangkitnya kembali perguruan Taman Siswa, tumbuhnya pesantren-pesantren (baik Islam, Katholik, Kristen, Budha, maupun Hindu) dalam konteks kebangsaan Indonesia, kiranya perlu dipikirkan untuk menjadi pusat pergerakan kebangsaan menghadapi tantangan masa mendatang. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan media komunikasi massa. Tumbuhnya seni dan kesusasteraan mungkin merupakan hal yang sesungguhnya dapat berperan besar di dalam proses pembudayaan ideologi kebangsaan sebagai gerakan. Seni dan sastra di masa yang lampau telah menjadi jalur yang amat penting di dalam tumbuhnya kebudayaan Indonesia. Terjemahan maupun gubahan atas Mahabarata dan Ramayana merupakan bagian yang penting di dalam fase akulturasi Hindu-Indonesia. Wayang dan dunia pedalangan merupakan dinamika kesenian yang kompleks yang dapat membentuk nilai tidak hanya dalam kalangan elit, akan tetapi menjadi bagian dari kehidupan rakyatnya pula. Tumbuhnya Pujangga Lama, yang disusul oleh bangkitnya Pujangga Baru dan lahirnya Angkatan '45 di dalam sejarah sastra Indonesia Merdeka merupakan manifestasi dari pergerakan cita-cita, wawasan dan rasa kebangsaan di dalam kesusasteraan Indonesia. Memang semua itu akan meminta terjadinya perenungan dan refleksi yang matang, mendalam dan kreatif atas nilai-nilai kebangsaan kita. Proses itupun akan meminta tumbuhnya Indonesianisasi dan penghayatan kehidupan keagamaan (bukan nasionalisasi agama dan theologi). Amat sukar memastikan apakah sekarang saatnya sudah matang untuk dapat memasuki tahap perkembangan seperti itu. Namun gejala-gejala yang membuka wawasan ke arah fase ini memang sudah mulai muncul. Kita perlu melampaui fase polemik sebagai terungkap di dalam sejarah sastra dalam beberapa ratus tahun yang lalu, dalam hal yang berkenaan dengan nilai-nilai dasar, termasuk hal "monotheisme kultural" dan "monotheisme Samawi," agama dan nilai-nilai kebangsaan. Kita sudah dapat maju untuk membangun secara lebih kreatif dan konstruktif. Bukan saja kerukunan di antara berbagai pergerakan yang harus diusahakan, akan tetapi kesadaran dan rasa kekerabatan persaudaraan dari pusat-pusat pergerakan kemasyarakatan, itulah yang harus ditumbuhkan.

Ideologi dan Akulturasi (Problem Masa Depan)

Mengapa walaupun ditawarkan berbagai aliran ideologi, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan tumbuh makin jelas dan makin kokoh di Indonesia? Sa-

lah satu uraian yang dapat memberikan keterangan atas proses tersebut adalah sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya kemampuan akulturasi di dalam kebudayaan Indonesia.

Pertumbuhan ideologi kebangsaan itu sendiri pada hakikatnya adalah proses dan produk akulturasi. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia tumbuh berkembang diperkaya dengan unsur-unsur dari luar, secara terus-menerus, baik unsur-unsur keagamaan maupun unsur-unsur non-keagamaan. Dapat dikatakan juga bahwa di dalam perkembangan itu terjadilah proses Indonesianisasi dari unsur-unsur yang datang dari luar.

Proses akulturasi tampak di masa yang telah lampau misalnya akulturasi terhadap Hinduisme dan Budhisme di Indonesia. Proses akulturasi masih berjalan terus. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi tantangan (sebagai *Gabe* dan sekaligus juga *Aufgabe*) untuk melaksanakan akulturasi dengan budaya dan peradaban modern yang telah tumbuh dan membentuk budaya dan peradaban global, di mana teknologi, pengetahuan dan ekonomi menjadi kekuatan utamanya.

Yang dimaksud dengan perkembangan budaya modern yang telah tumbuh melahirkan budaya dan peradaban global tersebut adalah rangkaian pertumbuhan dari lahirnya masyarakat industri di Eropa (sekitar abad ke-18), yang kemudian melahirkan masyarakat mekanik (sekitar abad ke-19), lalu masyarakat dengan peradaban otomatis (sekitar tahun 1945-1970-an), yang lebih lanjut melahirkan masyarakat dengan peradaban Kibernetik (1970-an sampai sekitar tahun 2000 yang akan datang), yang tentunya akan mengalami evolusi lebih lanjut menemukan proses "optimasinya" sehingga tidak mustahil akan lahir masyarakat dengan peradaban baru, yang oleh sementara disebut sebagai "Autonomous Society" dan "Natural Society." Memang masih menjadi teka-teki apakah proses tersebut akan merupakan evolusi sejarah kebudayaan sebagai proses humanisasi, sehingga masyarakat akan menjadi semakin manusiawi pula. Sementara mengatakan bahwa evolusi itu akan membawa proses humanisasi memasuki tahap yang secara kualitatif lebih tinggi, termasuk di dalamnya proses spiritualisasi di dalam kehidupan manusia. Fase-fase ini mungkin sekali membawa serta situasi-situasi yang cukup gawat di dalam sejarah manusia. Proses seperti ini memang telah menjadi salah satu bahan renungan bagi Teilhard de Chardin ataupun Tönnies. Yang jelas perubahan-perubahan di dalam peradaban sejarah manusia akan terjadi dan kita akan kena dampaknya. Perkembangan itu pun sejalan dengan evolusi pengetahuan (evolusi epistemologi), di mana dari "modern science" telah tumbuh "control science," lalu Cybernetics, Biotechnics dan Psychotechnics. Proses ini telah menumbuhkan teknologi modern, yang berevolusi dengan tumbuhnya automatic control technology, electronic control technology,

yang akan disusul dengan biologic control technology sampai kepada psychobiologic control technology.

Semua itu sekedar gambaran bahwa di hadapan kita terbentang pagelaran kemungkinan yang mengandung perubahan-perubahan besar, mendasar, yang tentu saja akan membawa akibat terhadap pembangunan struktural dalam tataran global. Dan berpegang kepada ideologi perjuangan kebangsaan, kita ingin terus berjuang sebagai bangsa yang bersatu, maju, merdeka, dan berdaulat.

Pancasila sebagai *formula etik kultural* membawa amanat bahwa di dalam mengarungi perkembangan tersebut kita harus tetap tidak meninggalkan kepercayaan kita terhadap Tuhan dan tidak pula melupakan budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta persatuan-kesatuan kebangsaan. Jalan kemajuan adalah tetap jalan kebudayaan. Pancasila sebagai *ideologi perjuangan kebangsaan* membawa amanat bahwa bangsa Indonesia harus memenangkan pergumulannya dengan jalannya sejarah yang akan datang itu nanti. Masalahnya adalah bagaimana membangun jalinan yang kreatif antara pertumbuhan sistem kebangsaan kita dengan pertumbuhan sistem global itu. Penguasaan teknologi, pengetahuan dan kemajuan ekonomi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Kita ditantang untuk menyiapkan kemampuan bangsa Indonesia mengadakan proses akulturasi dengan elemen-elemen utama budaya dan peradaban global. Di dalam konteks ideologi dan akulturasi maka permasalahannya adalah: bagaimanakah kita berusaha agar proses tumbuhnya kebudayaan dan peradaban global tersebut tidak akan melanda kehidupan kebangsaan kita, dan apakah yang perlu dilakukan sebagai langkah-langkah persiapan untuk mengadakan proses Indonesianisasi dari perangkat-perangkat kebudayaan dan peradaban global tersebut. Proses kearah Indonesianisasi yang maju ke situ bukanlah proses yang sederhana. Problem sosial-ekonomi akan tampil sebagai bagian yang peka di dalam perkembangan tersebut.

Empat puluh tahun telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengadakan proses Indonesianisasi atas dimensi ideologis dari kekuatan-kekuatan yang membentuk dan menumbuhkan budaya dan peradaban modern termasuk perkembangan global dewasa ini. Empat puluh tahun mendatang bangsa Indonesia ditantang lebih lanjut, yaitu mengadakan proses Indonesianisasi dari perangkat-perangkat budaya dan peradaban global tersebut. Kita tidak hanya berpikir mengenai modernisasi, kita ditantang untuk berpikir dalam lingkup global. Sebab di situlah perjuangan kebangsaan harus dilaksanakan.

PENUTUP

1. Baik selama fase penciptaan kerangka landasan maupun sepanjang perjalanan bangsa Indonesia di seberang kerangka landasan itu nanti, pembangunan ideologi tetap merupakan hal yang esensial.
2. Apabila pertumbuhan ideologi nasional berkembang baik, maka persatuan dan kesatuan kebangsaan akan menjadi semakin kokoh. Persatuan dan kesatuan kebangsaan adalah modal yang paling fundamental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kebangsaan adalah dalil dasarnya sejarah Indonesia.
3. Prospek tersebut akan menjadi makin mantap apabila doktrin Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, mengalami perkembangan lebih lanjut, baik dalam ekstensitas maupun intensitasnya. Hal ini berarti bahwa organisasi sosial-politik akan tumbuh menjadi organisasi yang sifatnya terbuka, menjadi organisasi-organisasi kebangsaan.
4. Klimat persatuan-kesatuan kebangsaan yang kokoh juga dapat memberikan kemungkinan tumbuhnya organisasi kemasyarakatan menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang kreatif produktif. Klimat tersebut akan menemukan kedalaman lagi apabila proses Indonesianisasi theologi dapat tumbuh berkembang di kalangan berbagai umat beragama di Indonesia. Apabila penghayatan nilai-nilai kebangsaan tidak diterima lagi sebagai ancaman tetapi justru dihayati sebagai *konteks*-nya kehidupan beragama, suasana itu akan ikut memacu proses spiritualisasi masyarakat yang sedang membangun. Bukan saja kerukunan antara umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sebab ini hanyalah sekedar prinsip *koeksistensi*) melainkan akan tumbuh suasana *persaudaraan* antara mereka, karena semuanya **bagaimanapun dikehendaki** pula oleh Tuhan menjadi bagian dari satu kehidupan kebangsaan sebagai alam kodratnya rakyat Indonesia. Bila proses ini terjadi maka pertumbuhan seni dan kesusastraan juga akan makin jelas identitasnya, fase keraguan dan ambivalensi di dalam nilai-nilai dasar akan terlewati sehingga akan memacu kreativitas budaya yang tinggi. Ideologi kebangsaan akan ditransformasikan ke dalam budaya kebangsaan. Bangsa Indonesia semakin menjadi bangsa Indonesia.
5. Pembangunan ideologi mempunyai relevansinya pula bagi proses akulturasi kehidupan kebangsaan kita dengan perkembangan budaya dan peradaban global, yang tampaknya akan semakin mewarnai perjalanan bangsa Indonesia di seberang kerangka landasan itu nanti.
6. Penghayatan Pancasila sebagai ideologi perjuangan kebangsaan mengandung di dalamnya kemampuan menghadapi tantangan-tantangan ke-

majuan. Dari sejarah kita dapat menyimpulkan bahwa ABRI, sebagai satu-satunya organisasi yang terus-menerus berpegang kepada ideologi perjuangan kebangsaan, adalah organisasi di Indonesia yang saat ini paling siap untuk memasuki era global tersebut, termasuk teknologi canggih di dalamnya. ABRI yang tetap seperti ini merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia memasuki *era-global* di masa mendatang.

7. Pembangunan bidang ekonomi perlu dipikirkan antara lain sebagai suatu wahana penguasaan teknologi maju, sebagai salah satu sarana akulturasi kita dengan peradaban global.
8. Kalau iklim ideologis dapat berkembang baik, maka perkembangan bidang ekonomi dapat makin diperlancar pula. Di bidang inilah kemungkinan besar timbul permasalahan-permasalahan yang sifatnya sosial dan kultural. Untuk itu dalam fase merakit kerangka landasan ini perlu sekali dipikirkan tumbuhnya *sistem ekonomi kebangsaan* sejajar dan bergandengan dengan "pola negara kebangsaan" dan "ideologi kebangsaan." Pemahaman pasal 33 UUD 1945 (dan pembangunan ekonomi pada umumnya) tampaknya perlu didasarkan atas pemahaman ideologi kebangsaan ini.
9. Agar problem sosial-ekonomi itu tidak akan menjadi hal yang makin memberat di masa mendatang, sehingga akan menghambat proses akulturasi kita dengan peradaban global, maka selama fase perakitan kerangka landasan itu perlu sekali ditumbuhkan pusat-pusat pergerakan ekonomi kemasyarakatan yang kreatif dan saling terkait.
10. Apabila saat ini ancaman, hambatan, gangguan, terutama masih ber-sumber di dalam negeri, maka perjalanan di seberang kerangka landasan itu nanti mungkin akan menampilkan interaksi dengan luar sebagai sumber ancaman, hambatan dan gangguan.
11. Untuk mengantisipasi perkembangan kemungkinan seperti itu maka pembangunan yang berwawasan Nusantara perlu sekali mewarnai usaha merakit kerangka landasan ini. Pusat-pusat pertumbuhan dan kesejahteraan perlu dibangun di berbagai medan strategis Indonesia sebagai kawasan Nusantara ini, yang sekaligus juga dapat terkait dengan konsep pertahanan keamanan kehidupan bangsa dan negara.
12. Karena semuanya itu akhirnya harus dilaksanakan oleh manusia Indonesia, maka pembangunan sistem pendidikan nasional yang secara konsisten menunjang proses ini amat diperlukan.

Memantapkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

BABARI*

Tujuh belas Agustus 1985 negara bangsa Indonesia genap berusia 40 tahun. Selama 40 tahun kita hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Selama kurun waktu ini kita telah berusaha mengisi kemerdekaan dengan program pembangunan yang meliputi semua bidang kehidupan. Maksudnya untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Tentu usaha ini dalam prosesnya mengalami hambatan, gangguan, dan tantangan sesuai dengan perkembangan suasana kehidupan bernegara bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam (pertahanan dan keamanan). Semua perkembangan itu telah memberi kita berbagai macam pengalaman sehingga bangsa kita menjadi semakin dewasa dalam hidup menegara.

Berdasarkan pada semua pengalaman itu maka pada hari ulang tahun yang ke-40 ini kita perlu melakukan refleksi terhadap suasana kehidupan bernegara bangsa. Maksudnya, kita perlu menyegarkan dan memperbaharui tekad dan kesadaran kita mengenai suasana kehidupan kita bernegara bangsa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Untuk itu kita juga perlu meninjau kembali kehidupan kita sebagai negara bangsa sejak tahun 1945 sehingga dengan demikian kita mengetahui sejauh mana kita telah berbuat untuk meningkatkan taraf hidup warga negara bangsa Indonesia. Dengan mengetahui hal ini kita dapat menentukan ke arah manakah perjalanan hidup negara bangsa Indonesia? Apakah semua langkah-langkah perjalanan kita selama ini sesuai dengan tujuan dan cita-cita pembentukan negara bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

*Staf CSIS.

Penjelasan UUD 1945 menunjukkan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung Pokok-pokok Pikiran:¹ (1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan; (2) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (3) negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia; (4) negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari UUD negara kesatuan Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu merupakan penjabaran dari Pancasila yang dikaitkan dengan peranan negara sebagai satu lembaga politik. Dan penjabaran ini dituangkan secara terperinci di dalam pasal-pasal UUD 1945. Semua ketentuan di dalam pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu sistem idea/gagasan yang secara normatif memberikan persepsi dan menjadi landasan serta pedoman tingkah laku dalam kehidupan bernegara bangsa bagi warga negara Indonesia guna mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dari sudut pandangan ini bangsa Indonesia menerima dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Sehubungan dengan itu semua, tulisan ini mencoba membahas dua hal, yaitu: (1) Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia; dan (2) proses memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Point (2) akan diuraikan secara periodik berdasarkan pada periodisasi sejarah nasional kita.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA KITA

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidato kenegaraannya 17 Agustus 1954 dengan judul "Anjuranku Kepada Segenap Bangsa Indonesia," antara lain mengatakan:

"Saudara-saudara, dalam hubungan ini buat sekian kalinya saya katakan, bahwa saya bukanlah pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan

¹Lihat UUD 1945, bagian Penjelasan.

tempo hari ialah sekedar memformulir perasaan-perasaan yang ada di dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-kata yang saya namakan 'Pancasila.' Saya tidak merasa membuat Pancasila. Dan salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno Saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara yang seindah-indahnya. ... Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu hidup lima perasaan. Lima perasaan itu dapat dipakai sebagai mempersatu daripada bangsa Indonesia yang 80 juta ini."²

Dari kutipan ini terlihat bahwa Soekarno menempatkan dirinya sebagai seorang yang menggali nilai dan norma yang hidup sebagai suatu tradisi di dalam masyarakat bangsa Indonesia sejak bangsa kita belum menerima pengaruh dari bangsa-bangsa lain.

Dalam proses penggalian ini, Soekarno selain membekali diri dengan pengetahuan yang diperolehnya dari literatur yang ada dan pengalamannya selama pergerakan kebangsaan juga melakukan perenungan-perenungan yang mendalam tentang semua segi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Hasil dari proses perenungan ini terlihat bahwa manusia Indonesia dalam memandang alam semesta, merenungi asal dan tujuan manusia, dan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup selalu menunjukkan sikap sebagai manusia yang religius, kekeluargaan, mencintai dan bangga akan tanah air tempat lahirnya, lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi baik secara perorangan maupun bersama-sama, dan selalu berikhtiar untuk hidup lebih baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Semua itu terlihat sebagai ide/gagasan yang dominan dalam hidup bermasyarakat di dalam bangsa kita. Dan semua itu terwujud dalam sikap dan perilaku hidup sebagai satu keutuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Setelah melakukan penggalian melalui perenungan yang mendalam, Soekarno sampai kepada kesimpulan, yaitu lima butir nilai dominan di dalam budaya bangsa Indonesia seperti yang dikemukakan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan ketua sidang (Radjiman Wediodiningrat) tentang Dasar di atas mana kita mendirikan negara Indonesia merdeka ini. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 ini BPUPKI menerima rumusan Pancasila sebagai fundamen, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.³ Isi rumusannya termuat dalam teks resmi Pembukaan UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap pembicaraan tentang Pancasila harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945.

²Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Penerbitan Basis, 1955), hal. 20.

³*Ibid.*, hal. 22.

Dengan tercantumnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 maka terlihat fungsi pertama Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Dasar yang melandasi bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti terdapat hubungan intrinsik di antara negara Republik Indonesia dengan Pancasila. Keinginan untuk memantapkan kehidupan negara Republik Indonesia sama dengan keinginan untuk memantapkan Pancasila sebagai dasar negara. Atau pun sebaliknya. Dengan demikian Pancasila telah menjadi landasan dan pedoman dari kehidupan negara bangsa Indonesia menyongsong hari depannya. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan nasional yang selayaknya harus ditaati dan dilaksanakan demi mencapai tujuan dan cita-cita negara bangsa kita seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain Pancasila telah menjadi asas kehidupan negara bangsa kita. Dalam proses perkembangan kehidupan kenegaraan kita Pancasila asas negara telah disinonimkan dengan Pancasila ideologi negara Indonesia.

Ideologi diartikan sebagai keseluruhan sistem idea atau gagasan-gagasan yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan bernegara bangsa guna mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Dari pengertian ini terlihat bahwa suatu ideologi terdiri dari dimensi realitas, yaitu pemahaman situasi sosial yang sedang dihadapi sebagai produk masa lampau suatu bangsa yang menegara; dimensi idealisme, yaitu usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan; dan dimensi fleksibilitas, yaitu penyusunan program umum yang kondisional dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁴ Di sinilah letak kekuatan suatu ideologi. Ideologi telah mampu memberikan harapan bagi masyarakat pendukungnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ataupun emosional.

Namun demikian perlu disadari bahwa ideologi juga memiliki aspek-aspek negatif, seperti yang terlihat dalam sejarah Eropa di mana ideologi dipakai untuk merongrong pemerintah dan mengubah keadaan secara radikal (Sosialisme, Marxisme, Nazisme, dan Fasisme). Selain itu ideologi sering memperbudak ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dalam perintah Adolf Hitler kepada para ilmuwan khususnya antropolog dan dokter Jerman untuk membuat pembuktian ilmiah bahwa bangsa Jerman adalah ras Aria, ras suku bangsa yang paling sempurna di dunia. Aspek negatif lain dari ideologi adalah menggunakannya untuk mempertahankan kepentingannya secara sepihak. Hal ini terlihat pada pemerintah komunis di negara mana pun sebelum berkuasa, mereka selalu menggunakan ideologi sebagai alat untuk merebut ke-

⁴Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, *Ideologi Pancasila Adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia* (Bandung, Januari 1983), hal. 10.

kuasaan dari pemerintah yang sah. Tetapi apabila sudah berhasil merebutnya, mereka akan menggunakan ideologi untuk menjaga statusquo berupa dipertahankannya kelas penguasa dan rakyat yang dikuasai.⁵ Dengan demikian terjadilah pemutlakan ideologi. Dan ideologi mulai menampilkan sifat totaliter-nya.

BAGAIMANA DENGAN IDEOLOGI PANCASILA

Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila diterima sebagai asas atau ideologi negara oleh para pendiri negara bangsa ini. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, Pancasila harus mampu memberikan wawasan, arah, asas, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan bernegara bangsa sehingga tujuan dan cita-cita bangsa dapat tercapai. Dalam fungsinya sebagai ideologi, Pancasila harus terungkap dalam sistem kemasyarakatan kita seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem hankamnas. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara menjiwai seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat bangsa.

Hal ini tidak berarti bahwa ideologi Pancasila itu bersifat otoriter karena mengatur semua sistem kehidupan dalam masyarakat termasuk sikap dan perilaku manusia pendukungnya. Ideologi Pancasila tetap menghormati kebebasan pribadi dan memperlakukan manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Manusia Indonesia menerima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai bagian dari hidup dan bukan sebagai suatu nilai yang dipaksakan dari luar. Oleh karena itu ideologi Pancasila tidak perlu diindoktrinasi kepada para pendukungnya seperti ideologi lainnya. Pemasyarakatan nilai-nilai ideologi Pancasila dapat dilakukan secara sederhana seperti penataran dan yang terpenting adalah teladan dari para pemimpin negara bangsa ini. Dengan cara ini diharapkan ideologi Pancasila akan mampu membawa kehidupan negara bangsa ini ke arah yang benar menuju tercapainya cita-cita kehidupan bernegara bangsa.

Selain itu ideologi Pancasila bukanlah suatu ideologi yang tertutup bagi ide dan realitas baru di dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Pergeseran dan perubahan nilai sebagai tanda adanya dinamika dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang harus diantisipasi oleh Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila harus mampu menjelaskan gejala-gejala kehidupan masyarakat yang terus berkembang itu. Tuntutan ini tentu akan dapat dipenuhi mengingat Pancasila itu sendiri merupakan hasil

⁵*Ibid.*, hal. 12-14.

penggalian nilai budaya bangsa dan hasil dari perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan kemampuan ideologi Pancasila untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat Indonesia ataupun menghadapi pengaruh kebudayaan dari luar sudah teruji dalam perkembangan sejarah negara bangsa Indonesia selama ini.

PROSES MEMANTAPKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Berbicara tentang proses itu berarti kita memakai pendekatan sejarah dalam melihat usaha bangsa Indonesia untuk memantapkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negaranya. Untuk itu kita perlu melakukan periodisasi untuk mengetahui peranan Pancasila sebagai ideologi negara dalam setiap kurun waktu. Dari proses ini akan terlihat usaha dari bangsa Indonesia memantapkan Pancasila sebagai ideologi negaranya, yang pada hakikatnya merupakan satu kesepakatan nasional yang mengisi kehidupan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat ideologi negara tidak dapat dipisahkan dari negara Republik Indonesia sebagai wadahnya, maka periodisasi proses memantapkan Pancasila ideologi negara adalah sebagai berikut:⁶

Periode Pertama, kurun waktu di antara 29 Mei 1945 sampai dengan 17 Juli 1945;

Periode Kedua, kurun waktu di antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 26 Desember 1949;

Periode Ketiga, kurun waktu di antara 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950;

Periode Keempat, kurun waktu di antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959;

Periode Kelima, kurun waktu di antara 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yang dapat dibagi lagi atas: 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, dan 11 Maret 1966 sampai sekarang.

Periode Pertama

Periode ini dapat disebut sebagai tahap membahas dan merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kegiatan ini terjadi di dalam forum sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang dan

⁶A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985), hal. 23.

keanggotaannya terdiri dari pemuka masyarakat dan kelompok intelektual bangsa kita. Mereka adalah orang-orang yang secara aktif ikut dalam pergerakan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Di dalam kegiatan membahas dan merumuskan ini semua anggota badan itu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Terlihat ada suasana musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam forum persidangan badan ini, pendapat dari Ir. Soekarno yang dikemukakan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 diterima sebagai pendapat yang benar dan tepat menjawab pertanyaan Ketua Sidang tentang apa dasar negara kita yang akan terbentuk. Dalam pidato itu Ir. Soekarno mengemukakan tentang lima sila dari Pancasila sebagai dasar negara. Pidato ini tahun 1947 dibukukan dengan judul *Lahirnya Pancasila*.⁷ Dengan modal dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno ini BPUPKI membentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul,⁸ dari para anggota. Panitia ini menyampaikan hasil kerjanya berupa Rancangan redaksi pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar kepada BPUPKI tanggal 10 Juli 1945.⁹ Panitia Kecil itu diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam pidato laporan hasil kerja Panitia Kecil itu, Ir. Soekarno mengemukakan bahwa di dalam persidangan-persidangan Panitia Kecil ditemukan kesukaran mencari kecocokan paham antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan terutama dalam masalah agama dan negara.

Usaha mengatasi kesukaran ini, Panitia Kecil mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI dan rapat ini berhasil membentuk Panitia Sembilan, yaitu Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kiai Abd. Kahar Moezakkir, Kiai Wachid Hasjim, Abi-koesno Tjokrosoejoso, dan Hadi Agoes Salim.¹⁰ Permusyawaratan di dalam Panitia Sembilan ini berhasil mencapai mufakat antara pihak Islam dengan pihak Kebangsaan. Hasil permufakatan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yaitu rancangan pembukaan hukum dasar yang dimajukan ke dalam sidang BPUPKI sebagai satu usul oleh Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul. Di dalam Piagam Jakarta ini rumusan Pancasila mulai ditambah dengan 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di belakang kata Ketuhanan.

Di samping itu BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang dan diketuai pula oleh Ir. Soekarno. Dan

⁷Lihat, *Lahirnya Pancasila*.

⁸Prof.Mr.Drs. Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1959), hal. 30.

⁹*Ibid.*, hal. 30.

¹⁰*Ibid.*, hal. 52.

tanggal 11 Juli 1945 di dalam rapat Panitia Hukum Dasar ini juga dibentuk lagi Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 7 orang anggota dengan ketuanya Soepomo.¹¹ Tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan usul, pendapat, dan pandangan dari semua anggota panitia. Hasil kerja dari kedua panitia ini dilaporkan oleh Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul di dalam rapat BPUPKI tertanggal 14 Juli 1945. Setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan redaksi berlandaskan pada semangat musyawarah untuk mencapai muafakat akhirnya hasil kerja Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul itu diterima oleh semua anggota sidang BPUPKI sebagai satu-satunya konsep yang akan dimatangkan lagi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada periode pertama ini terlihat tiga aliran paham yang saling berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Ketiga aliran paham ini adalah paham keagamaan (Islam), paham Kebangsaan, dan paham Modern Sekular. Pertentangan di antara paham Kebangsaan dan Agama dapat disepakati melalui perumusan Pembukaan UUD 1945 seperti yang terdapat di dalam Piagam Jakarta, sedangkan munculnya aliran pikiran modern sekular yang mengetengahkan beberapa nilai hak-hak asasi kemanusiaan terlihat di dalam rapat Panitia Perancang UUD 1945 yang dipimpin oleh Soepomo. Oleh karena itu di dalam konsep Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 14 Juli 1945 oleh BPUPKI terlihat tiga aliran paham di atas. Ketiga aliran paham ini terumus secara kompromistis di dalam Pancasila.

Periode Kedua

Tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia berhak menyusun satu pemerintahan yang berdaulat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu dilakukan setelah tercapai kesepakatan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)¹² dengan para pemuda pejuang dalam sidang di rumah Laksamana Maeda tanggal 16 malam. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, seorang opsir Angkatan Laut Jepang menemui Bung Hatta untuk menyampaikan keberatan orang-

¹¹*Ibid.*, hal. 54.

¹²Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) anggotanya diambil dari seluruh wilayah tanah air dan pembentukannya disetujui oleh Jenderal Terauchi tanggal 7 Agustus 1945. Untuk menghilangkan kesan bahwa kemerdekaan kita direstui oleh pemerintahan Pendudukan Jepang, maka dengan kemauan sendiri tanggal 18 Agustus keanggotaan badan ini ditambah 6 orang, yaitu Moh. Hassan, Hamildan, Ki Hadjar Dewantara, Kasman. Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumatri, dan Soebardjo.

orang Indonesia Timur terhadap 7 buah kata yang berkaitan dengan sila Ketuhanan di dalam Piagam Jakarta. Menurut mereka pencantuman ketujuh kata itu bersifat diskriminatif.

Bung Hatta, salah seorang pendiri negara bangsa yang sangat mementingkan persatuan dan kesatuan negara bangsa Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberatan itu. Oleh karena itu tanggal 18 Agustus 1945 pagi sebelum sidang PPKI (yang anggotanya telah ditambah 6 orang) Bung Hatta mengadakan pertemuan dengan 4 orang pemuka agama Islam anggota PPKI, yaitu Kiai Wachid Hasyim, Kiai Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandar Dinata, dan Abdoel Kadir. Dalam pertemuan itu Bung Hatta mengemukakan keberatan yang disampaikan kepadanya, dan sekaligus mengharapkan agar keempat pemuka agama Islam setuju untuk mencoretnya sehingga persatuan dan kesatuan negara bangsa ini tetap dapat terwujud. Kesepakatan mereka itu menjadi pendirian bersama mereka di dalam sidang PPKI siang harinya.

Sidang PPKI hari itu dipimpin oleh Ketua Panitia Ir. Soekarno. Maksud dan tujuan sidang hari itu adalah: menetapkan Pembukaan UUD 1945, menetapkan UUD 1945, dan memilih presiden serta wakil presiden negara Republik Indonesia.¹³ Pada saat membuka sidang Ir. Soekarno antara lain mengharapkan agar semua anggota panitia hanya membicarakan hal-hal yang pokok dan tidak terjerumus kepada pembicaraan sampai ke soal-soal yang kecil. Selanjutnya Bung Hatta dipersilakan untuk membacakan konsep Pembukaan UUD 1945. Setelah membahas dan melakukan beberapa perubahan redaksional Pembukaan UUD 1945 (seperti yang dipakai sekarang ini) diterima dan disahkan. Di dalam Pembukaan ini tercantum rumusan sila-sila Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara kita. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara Pancasila harus mampu merefleksikan dirinya di dalam semua bidang kehidupan bernegara bangsa. Dari sisi ini terlihat jelas kaitan yang erat di antara Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945, dan Pancasila yang tercantum di alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 itu. Artinya, apabila ada keinginan untuk mengubah Pembukaan UUD Proklamasi dan/atau Pancasila yang tercantum di dalamnya, adalah sama dengan membubarkan negara Proklamasi, negara Pancasila, negara Republik Indonesia yang didirikan 1945.¹⁴

Selanjutnya pada tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang berisi anjuran pemerintah kepada pemerintah daerah untuk segera melaksanakan otonomi daerah. Hal ini diharapkan agar partisipasi rakyat dalam pemerintahan dapat lebih meningkat.

¹³Dr. Mr. D. Notonagoro, *op. cit.* hal. 10.

¹⁴Dr. Mr. Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* hal. 10.

paham yang ada dalam masyarakat sehingga mampu bersama pemerintah memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Berdasarkan maklumat itu terbentuklah partai-partai politik yang apabila ditinjau dari pandangan-pandangan ideologisnya dapat dikelompokkan dalam tiga sumber ideologi, yaitu: (1) partai-partai politik yang berdasarkan ideologi keagamaan (Masyumi, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik); (2) partai-partai politik yang berdasarkan ideologi Barat Modern Sekular (Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Komunis Indonesia); dan (3) partai-partai politik yang berorientasi kepada ideologi persatuan dan kebangsaan (Partai Nasional Indonesia).¹⁵

Mulai saat itu terjadi persaingan di antara kelompok-kelompok pendukung ideologi untuk merebut kedudukan di dalam pemerintahan negara. Hal ini terlihat antara lain dalam maklumat pemerintah 14 November 1945 yang isinya menetapkan bahwa tanggung jawab menteri (kabinet) kepada parlemen (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat), dan bukan lagi kepada presiden seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945. Mungkin hal ini dapat dibenarkan mengingat kondisi dan situasi kehidupan kenegaraan kita pada waktu itu. Namun demikian sebenarnya mulai saat itu pula kita telah menyimpang dari UUD 1945. Persaingan ideologis juga terlihat pada seringnya terjadi pergantian kabinet. Dan yang paling menonjol dari persaingan ideologi itu adalah pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948 dan diproklamasikannya Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo di daerah Jawa Barat, yang kemudian pengaruhnya menyebar ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.¹⁶ Semua peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa terjadi persaingan ideologi. Adanya berbagai ideologi golongan di samping ideologi Pancasila ini, pada satu pihak terus memperuncing pertentangan antara ideologi golongan dan pada pihak lain masyarakat bangsa Indonesia tidak mempunyai kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan.

Periode Ketiga

Periode ini berlangsung hanya sekitar 8 bulan. Namun demikian ada beberapa perubahan penting di dalam kehidupan ketatanegaraan kita: *Pertama*, UUD 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar Negara Serikat. Di dalam UUD Negara Serikat pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berbentuk federasi.¹⁷ Hal ini berarti bangsa Indonesia meninggalkan

¹⁵A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 67.

¹⁶P. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafitipers, 1983), hal. 59-371.

¹⁷Drs. H.A.K. Pringgodigdo SH, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Jakarta: PT Pembangunan, 1966), hal. 18.

bentuk negara kesatuan seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945. Kedua, perumusan sila-sila Pancasila yang terdapat di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Serikat berbeda dengan rumusan yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. Perbedaan itu terlihat pada rumusan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi perikemanusiaan; sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi kebangsaan; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi kerakyatan; dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi keadilan sosial.

Meskipun perumusan sila-sila Pancasila berbeda dengan rumusan autentik yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, secara ideologis Pancasila tetap diterima sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia Serikat. Kesamaan ideologi ini merupakan daya dorong bagi para pemimpin negara bagian dan satuan-satuan negara yang berdiri sendiri untuk selalu berikhtiar mencari kesatuan dan persatuan negara bangsa. Proses menuju ke persatuan dan kesatuan ini mendapat hambatan berupa terjadinya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 23 Januari 1950 di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Raymon Westerling dengan dukungan golongan Kolonialis Belanda. Di samping itu Kapten Andi Azis melakukan petualangan politik di Makassar tanggal 5 April 1950. Juga Christian Robert Steven Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Semua gerakan ini berhasil dihadapi oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan mengirim Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Setelah itu pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno sebagai Presiden RIS membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan dan berdirilah kembali negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Periode Keempat

Periode ini merupakan masa perdebatan terbuka tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Perdebatan itu terjadi di dalam forum sidang konstituante (badan pembuat undang-undang dasar), pidato-pidato, media massa (surat kabar), dan forum seminar atau diskusi. Fokus dari perdebatan itu adalah: *apakah menerima atau menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara*. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan kita mulai dipertentangkan dengan dasar dan ideologi keagamaan serta dasar dan ideologi yang bersifat sekular. Usaha untuk menetralisasi pertentangan pandangan tentang Pancasila seperti ini dilakukan di dalam forum seminar Pancasila 1 Februari 1959 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di dalam

Forum itu Prof. Dr. Drijarkara SJ mengemukakan pendapatnya bahwa Pancasila itu tidak menghendaki negara sekular, tetapi juga tidak menghendaki negara agama.¹⁸ Dan formula ini tetap dipakai sampai sekarang.

Konstituante yang terbentuk sebagai hasil pemilihan umum 1955 mulai bersidang tanggal 10 November 1956. Di dalam lembaga ini terdapat 40 fraksi dengan ideologinya masing-masing. Namun demikian pada saat pembahasan tentang dasar negara terjadi polarisasi aliran-aliran ideologi ini sehingga yang tampak secara eksplisit tiga aliran ideologi utama. Ketiga aliran itu adalah aliran yang menghendaki sosio-ekonomi sebagai dasar negara dan menolak Pancasila atau Islam; aliran yang menghendaki agama Islam sebagai dasar negara dan menolak sosio-ekonomi dalam Pancasila; dan aliran yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara dan menolak sosio-ekonomi dan agama Islam.¹⁹

Setelah perdebatan itu berlangsung selama kurang lebih setahun yang hasilnya menunjukkan bahwa kesepakatan tentang dasar negara yang cocok bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak akan tercapai lagi dalam forum konstituante ini, maka Presiden Soekarno atas nama pemerintah tanggal 22 April 1959 dalam pidatonya di depan sidang Konstituante menyampaikan anjurannya agar kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran pemerintah ini ditanggapi dengan sikap pro dan kontra di lembaga Konstituante. Ada golongan yang setuju dengan anjuran pemerintah dan golongan yang menolak anjuran pemerintah itu. Untuk itu dilakukan pemungutan suara sebanyak tiga kali dan hasilnya tidak ada karena tidak mencapai jumlah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Oleh karena itu kedua fraksi besar, yaitu PNI dan PKI menyatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri lagi sidang-sidang Konstituante.

Suasana seperti ini mendorong pemerintah untuk memberikan penilaian bahwa Konstituante sebagai lembaga pembuat Undang-Undang Dasar yang cocok bagi negara kesatuan Republik Indonesia tidak mampu lagi melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh pemerintah dan seluruh rakyat kepadanya. Dan keadaan seperti ini merupakan bahaya yang mengancam kesatuan dan persatuan kehidupan bernegara bangsa. Oleh karena itu Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya menetapkan pembubaran Konstituante, berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan membentuk MPRS, DPAS. Dekrit ini mendapat dukungan sepenuhnya dari PNI dan Angkatan Darat serta diterima oleh semua golongan masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

¹⁸Mimbar Indonesia, 11 Maret 1959, hal. 8, 9, 31.

¹⁹A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 134

Dekrit Presiden ini merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi kemelut dan bersifat mengantar kehidupan ketatanegaraan RI untuk ditata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUD 1945. Bersamaan dengan itu maka ideologi Pancasila sebagai yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 berlaku kembali. Dan mulai saat itu pula persaingan/pertentangan ideologi golongan menjadi semakin tajam dan sangat membahayakan kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia.

Periode Kelima

Apabila di Periode Keempat terjadi pertentangan-pertentangan ideologis yang tajam untuk merebut kedudukan menjadi ideologi negara, maka pada Periode Kelima ini Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara hanya menjadi semboyan kosong yang diucapkan di dalam pidato-pidato pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, dan para pemimpin organisasi massa yang berafiliasi pada satu kekuatan sosial-politik tertentu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada masa itu ingin digantikan secara sistematis melalui tata cara yang dipaksakan agar sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Usaha menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dimulai dengan indoktrinasi Manipol-Usdek. Manipol (Manifesto Politik) merupakan intisari dari pidato kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita." Sedangkan Usdek merupakan lima kebijaksanaan yang tercantum di dalam Manipol, yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Sosialisme Indonesia; Demokrasi Terpimpin; Ekonomi Terpimpin; dan Kepribadian Indonesia. Manifesto Politik ini oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara dinyatakan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pernyataan DPAS ini kemudian dikuatkan oleh MPRS melalui ketetapan No. I/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dari sini mulai terlihat bahwa UUD 1945 diselewengkan oleh Lembaga Tinggi dan Lembaga Tertinggi negara. Namun tata cara ini dibenarkan dalam sistem Demokrasi Terpimpin.

Persaingan dan pertentangan ideologis terus berlangsung di antara partai-partai politik bersama dengan organisasi massa pendukungnya. Oleh karena itu pemerintah tanggal 31 Desember 1959 mengeluarkan satu ketentuan tentang sistem kepartaian. Ketentuan-ketentuan itu antara lain:²⁰ (1) harus menerima dan membela Konstitusi dan Pancasila; (2) menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik; (3) menerima ban-

²⁰Muskens, *Sejarah Gereja Katholik Indonesia*, jilid IV, 1973, hal. 416.

tuan dari luar negeri hanya seizin pemerintah; (4) presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai; (5) presiden berhak membubarkan partai politik. Berlandaskan pada ketentuan ini maka pada bulan Agustus 1960 Masyumi dan PSI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Bersamaan dengan pengaturan kehidupan partai politik ini tanggal 31 Desember 1959 keluar Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 tentang Front Nasional. Lembaga ini merupakan wadah kesatuan dan persatuan dari semua kekuatan bangsa. Melalui lembaga ini Presiden Soekarno mulai mengembangkan pemikirannya tentang usaha mempersatukan semua kekuatan sosial-politik yang berorientasi pada ideologinya masing-masing dalam satu ikatan kerja sama. Hasil usahanya ini terwujud dalam rumusan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme).

Lahirnya konsepsi Nasakom ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial-politik di Indonesia terletak dalam tiga tangan, yaitu tangan golongan Nasionalis, golongan Agama, dan golongan Komunis. Ketiga golongan ini memiliki ideologi perjuangannya masing-masing sehingga kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi rapuh. Presiden Soekarno melalui Demokrasi Terpimpinnya mencoba untuk mempersatukan ketiga golongan itu. Timbul yargon-yargon tentang "Nasakom bersatu," yang kemudian berubah menjadi "Nasakom jiwaku." Dengan demikian norma-norma kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi berpedoman pada Pancasila tetapi pada Nasakom. Golongan masyarakat yang tidak menerima Nasakom dicap anti-revolusi dan harus disingkirkan. Nasakomisasi aparatur pemerintahan dan semua Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara dilaksanakan secara sistematis. Setelah proses itu berjalan D.N. Aidit sebagai Ketua CC-PKI pernah mengemukakan statement-nya yang mengatakan bahwa "Pancasila hanya sekedar alat pemersatu belaka dan jika persatuan telah tercapai dalam bentuk persatuan tiga golongan (nasionalis, agama, dan komunis) maka Pancasila tidak akan diperlukan lagi."²¹ Usaha untuk menggantikan Pancasila ini mencapai klimaksnya pada saat meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Reaksi terhadap G-30-S/PKI ini mendorong timbulnya pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad ini berlandaskan pada keyakinan Pemerintah Orde Baru bahwa hanya dengan Pancasila dan UUD 1945 bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang serta dapat melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap menuju tercapainya cita-cita bangsa se-

²¹Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)* (Jakarta, 1978), hal. 46-47.

perti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu dilakukanlah usaha untuk menemukan kembali Pancasila yang benar dan meluruskan pelaksanaan UUD 1945. Usaha itu dimulai dengan pembubaran PKI oleh Jenderal TNI Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966 dalam kedudukannya sebagai pemegang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Langkah berikutnya adalah konsolidasi pemerintahan dan memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.²²

Usaha untuk menemukan kembali Pancasila yang benar dilakukan melalui simposium di Universitas Indonesia dengan tema "Kebangkitan Semangat '66, Menjelajah Tracee Baru," tanggal 6-9 Mei 1966. Kesimpulan dari simposium itu di bidang ideologi diturunkan dengan judul "Kembali ke Rel Pancasila Sejati,"²³ yang antara lain menegaskan bahwa:

"Ketidakjelasan Pancasila akhir-akhir ini memungkinkan dipaksanya Pancasila sesuai dengan ide atau jalan pikiran yang ternyata tidak serasi dengan Pancasila sendiri. Maka dimungkinkannyalah proses penyelubungan dan pengaburan terhadap makna Pancasila oleh berbagai neologisme, 'semantic overgrowth,' kekacauan-makna dan logika pura-puraan (pseudo-logika) lainnya. Dan inilah menjadi salah satu sumber daripada penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila. ... Simposium merasa bahwa pemurnian Pancasila dari segala tafsiran tambahan adalah perlu, dan perlulah ditiadakan segala ide dan jalan-jalan pikiran yang sampai saat ini memungkinkan penyelewengan dari rel Pancasila sejati. Tracee baru adalah mengembalikan Pancasila pada maknanya yang murni tanpa tafsiran tambahan dan lain-lain. Untuk memungkinkan ini maka simposium mengusulkan agar pembahasan dan perbandingan pendapat tentang Pancasila dilanjutkan, untuk ditingkatkan pada pembahasan pelaksanaan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia."

Sedangkan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen terlihat di dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Di dalam Memorandum itu ditetapkan bahwa Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam pidato kenegaraan tahun 1967, Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto antara lain mengatakan bahwa "mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itulah fungsi dan tujuan Orde Baru." Dengan penegasan ini terlihat bahwa pimpinan pemerintahan Orde Baru yakin bahwa hanya dengan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang menjadi pedoman perjuangan bangsa Indonesia dapat mencapai cita-citanya.

Berdasarkan pada keyakinan itu maka selama pemerintahan Orde Baru ini terlihat usaha-usaha yang sistematis dan konstitusional untuk memantapkan

²²Ali Mocrtopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 17.

²³Simposium UI, *Kebangkitan Semangat '66: Menjelajah Tracee Baru*, (Jakarta, 1966).

kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan kita. Kenyataan ini dapat dilihat secara kronologis sebagai berikut. Tahun 1966 melalui Tap No. XX/MPRS/1966, MPRS telah mempertegas status Pancasila sebagai sumber hukum negara. Tahun 1973 melalui Tap No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, MPR menegaskan tentang hubungan antara Pancasila dan Pembangunan Nasional. Tahun 1978 melalui Tap No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa), MPR menegaskan bahwa Pancasila sebagai nilai kebudayaan bangsa harus dihayati oleh semua warga negara Indonesia. Dengan cara Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dijabarkan melalui penataran-penataran dan Pendidikan Moral Pancasila di sekolah-sekolah. Selanjutnya pada tahun 1983 melalui Tap No. II/MPR/1983 tentang GBHN ditegaskan dua hal utama, yaitu: (1) Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial-politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas; dan (2) pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Perintah GBHN ini telah terwujud di dalam dua buah undang-undang, yaitu UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam kedua UU itu terdapat ketentuan mengenai asas yang menetapkan bahwa semua organisasi kekuatan sosial politik (PPP, Golkar, dan PDI) hanya memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas dan semua asas sebagai ciri golongan yang dipakai sebelumnya tidak dibenarkan untuk dipergunakan lagi. Ketentuan tentang asas ini juga berlaku bagi semua organisasi sosial-kemasyarakatan. Di samping itu agar kedudukan UUD 1945 tidak boleh diganggu-gugat lagi, meskipun pasal 37 UUD 1945 membenarkan untuk melakukan perubahan UUD 1945 telah ditetapkan UU No 5 tahun 1985 tentang Referendum. Di dalam UU ini dikatakan bahwa apabila ada keinginan dari anggota/golongan masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 maka pendapat rakyat harus ditanyakan terlebih dahulu. Semua ini menunjukkan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memantapkan Pancasila dan UUD 1945.

PENUTUP

Setelah kita menelusuri proses yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia untuk memantapkan Pancasila sebagai ideologi negaranya terlihat bahwa kehadiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia bukan tanpa tantangan dan hambatan. Dalam proses perjalanannya Pancasila sebagai ideologi negara harus menghadapi tantangan dari ideologi lainnya, seperti ideologi keagamaan dan ideologi sekular lainnya yang sama-sama ber-

ikhtiar untuk menjadi ideologi negara Republik Indonesia. Menghadapi tantangan ini ideologi Pancasila selalu keluar sebagai pemenang. Hal ini merupakan bukti bahwa seluruh warga negara bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai milik bersama dan oleh karena itu timbul tekad untuk tetap mempertahankan kelestariannya serta semakin memantapkan kedudukannya sebagai ideologi negara.

Masalahnya kini dan selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Kita perlu menjawab pertanyaan ini. Apabila tidak nilai-nilai Pancasila itu hanya tinggal sebagai semboyan/slogan yang diucapkan dalam pidato-pidato yang tidak pernah terwujud secara nyata di dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar untuk diteriak-teriakkan tetapi harus dibuktikan di dalam kerja nyata. Bila demikian halnya maka pada saatnya nanti bangsa Indonesia akan mampu merumuskan refleksi ideologi Pancasila ini ke dalam setiap bidang kehidupan kemasyarakatannya.

Pembangunan Ideologi Selama Orde Baru: Problem dan Prospeknya

M. DJADIJONO*

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang tampak secara jelas dan menonjol dalam masa Orde Baru ini adalah terjadi dan dilakukannya pembangunan ideologi. Oleh karena itu kiranya ada baiknya apabila masalah pembangunan ideologi selama Orde Baru itu diperhatikan, terutama mengenai aspek-aspek yang berkenaan dengan bagaimana proses pembangunan ideologi itu terjadi dan dilakukan.

Di dalam membahas masalah pembangunan ideologi selama Orde Baru itu paling kurang ada tiga hal yang perlu dicatat. *Pertama*, bahwa Orde Baru bukanlah orde yang berdiri sendiri. Ia memiliki latar belakang sejarahnya dalam arti memiliki dimensi masa lalu dan masa depan. Orde Baru memiliki dimensi "past and future." *Kedua*, bahwa bangkit dan berkembangnya Orde Baru itu tidak dapat dilepaskan dari peranan "eksponen-eksponennya," terutama Jenderal TNI Soeharto. *Ketiga*, akhir-akhir ini ada sementara pendapat yang menyimpulkan bahwa pembangunan ideologi yang dilakukan oleh Orde Baru selama ini, pada saat sekarang sudah mencapai titik puncak ketuntasan-nya dengan telah ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas tulisan ini akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan: (1) arti pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara; (2) problem ideologi pada masa-masa sebelum Orde Baru; (3) peranan Orde Baru dalam pembangunan ideologi; (4) tahap-tahap pembangunan ideologi nasional Pancasila; (5) prospek kehidupan ideologi nasional di masa mendatang; (6) catatan penutup.

*Staf CSIS.

ARTI PENTING IDEOLOGI BAGI SUATU BANGSA DAN NEGARA

Agar uraian mengenai pembangunan ideologi selama Orde Baru itu dapat lebih jelas dipahami, dalam tulisan ini akan dikemukakan pula arti penting ideologi bagi suatu bangsa dan negara.

Ideologi pada mulanya diartikan sebagai "science of ideas." Pengertian itu kemudian berkembang karena pengaruh Karl Marx di Eropa Barat. Marx mengartikan ideologi sebagai "pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Dalam arti ini ideologi diartikan sebagai Überbau atau bangunan atas, yang didirikan di atas basis ekonomis yang menentukan coraknya; dan karena itu ideologi mencerminkan pola ekonomis tertentu yang oleh karenanya kadar kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu."¹

Pendapat lain menyatakan bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem idea yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupannya dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.²

Dalam perkembangannya sampai saat ini, ideologi paling kurang mempunyai tiga pengertian: (1) sebagai "weltanschauung" atau "science of ideas," yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran dan cita-cita besar, mengenai sejarah, manusia, masyarakat dan negara; (2) sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan; (3) sebagai suatu "belief system -- sistem nilai" dan karenanya berbeda dengan ilmu, filsafat ataupun theology yang secara formal merupakan "knowledge system -- sistem ilmu pengetahuan." Dalam kaitannya dengan manusia, bangsa dan negara, ideologi diartikan sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara.³

Karena yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini adalah pembangunan ideologi nasional, maka perlu kiranya dikemukakan arti ideologi nasional itu sendiri. Ideologi nasional adalah cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk

¹Lihat *Ensiklopedi Politik, Pembangunan, Pancasila* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, CLC, 1983), Jilid 2, hal. 122.

²Lihat Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan Bandung, *Ideologi Pancasila Adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia*. Bandung, 1983, hal. 9-10.

³Lihat Kirdi Dipoyudo, *Pancasila Arti dan Pelaksanaannya*, Jakarta, CSIS, 1979, hal. 9.

memperoleh kemajuan dan perbaikan di segala bidang demi mencapai kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi nasional secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman untuk mencapai cita-cita, dasar-dasar guna peningkatan usaha untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan, yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari.⁴

Selanjutnya untuk dapat mengetahui perlunya ideologi bagi suatu bangsa dalam hidup bernegara, terlebih dahulu perlu dijelaskan fungsi ideologi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan hidup suatu bangsa yang bernegara, ideologi berfungsi sebagai: dasar dan kerangka bagi kehidupan bersama; juga sebagai pemberi arah dan tujuan bagi pengharapan, pemikiran dan kegiatan bersama dari semua unsur yang ada dalam masyarakat suatu negara.⁵ Oleh karenanya, negara sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan bersifat nasional hanya akan dapat dikemudikan secara terarah dan efisien apabila ada gambaran yang jelas mengenai hakikat, tujuan, dasar dan susunannya.⁶ Dengan melihat fungsi ideologi seperti terurai di depan dapatlah dikatakan bahwa gambaran mengenai hakikat, tujuan, dasar dan susunan suatu negara itu terkristalisasikan dalam bentuk ideologi, dan ideologi itu adalah yang bersifat nasional. Dengan demikian ideologi nasional sangat penting artinya bagi kehidupan suatu bangsa dalam hidup bernegara, maupun bermasyarakat. Tanpa ideologi nasional, kehidupan bangsa yang bersangkutan akan terombang-ambing. Sebaliknya, dengan ideologi nasional, bangsa yang bersangkutan akan kukuh kuat karena memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya tujuan yang jelas itu harus bersumber pada pandangan hidupnya sendiri, kepribadiannya sendiri oleh karena tidak akan ada satu model pembangunan pun yang mungkin telah berhasil memecahkan masalah-masalah di dalam negerinya dapat cocok diterapkan untuk masyarakat lain.⁷

⁴Lihat pendapat Hardi SH dalam Harsja W. Bachtar (ed.), *Percakapan dengan Sidney Hook: Etika, Ideologi Nasional, Marxisme dan Eksistensialisme* (Jakarta: Djambatan, 1976), hal. 72.

⁵Lihat T.B. Simatupang, "Ideologi-ideologi Besar di Dunia di Masa Datang dan Kemungkinan Pengaruhnya terhadap Pengamanan Pancasila," artikel dalam majalah *Ketahanan Nasional* (diterbitkan oleh Lemhannas), Tahun VIII, No. 25, 1979, hal. 81-82.

⁶Kirdi Dipoyudo, *op. cit.*, hal. 9.

⁷Lihat Rapiuddin Hamarung, "Pembaharuan Sistem dan Struktur Politik di Indonesia," majalah *Ketahanan Nasional*, Tahun IX, No. 26, 1980, hal. 88. Lihat pula Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di depan sidang DPR-GR tanggal 16 Agustus 1967; Pidato Presiden Soeharto pada Dies Natalis Universitas Indonesia yang ke-25 tahun 1975.

PROBLEM IDEOLOGI SEBELUM MASA ORDE BARU

Dalam usaha mencari gambaran yang lebih jelas mengenai kehidupan ideologi nasional sebelum masa Orde Baru, tulisan ini akan melihat dua periode sistem politik di Indonesia, yakni sistem politik Demokrasi Liberal dan sistem Politik Demokrasi Terpimpin. Kedua periode tersebut perlu ditelaah oleh karena kehidupan ideologi nasional yang kacau pada masa Demokrasi Terpimpin itu sedikit banyaknya merupakan resonansi dari kekacauan yang terjadi pada masa sebelumnya, yakni periode sistem politik Demokrasi Liberal. Di samping itu juga penting diketahui sebagai latar belakang timbulnya sistem politik Demokrasi Pancasila.

Ketika di Indonesia diterapkan sistem politik Demokrasi Liberal, kehidupan ideologi nasional-Pancasila mengalami kekacauan oleh karena adanya perdebatan dalam lembaga Konstituante maupun dalam masyarakat luas sebagai akibat dianutnya berbagai ideologi di luar Pancasila oleh kekuatan-kekuatan sosial politik ketika itu. Pada masa Demokrasi Liberal ini dapat disebut paling kurang ada 3 (tiga) buah ideologi yang dianut oleh partai-partai politik di masa itu, masing-masing adalah: (1) ideologi Keagamaan yang dianut oleh partai-partai: Masyumi, PSII, NU, Perti, Parkindo, Partai Katolik; (2) ideologi Kebangsaan yang dianut oleh partai-partai: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Parindra), Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Demokrasi Rakyat (Banteng), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Wanita Rakyat (PWR), Partai Kebangsaan Indonesia (Parki), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Ikatan Nasional Indonesia (INI), Partai Rakyat Jelata (PRD), Partai Tani Indonesia (PTI), Wanita Demokrat Indonesia (WDI); (3) ideologi Marxisme yang dianut oleh partai-partai: Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Buruh, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai).⁸

Adanya ideologi partai-partai seperti itu menyebabkan kehidupan ideologi nasional Pancasila mengalami kekacauan. Hal itu disebabkan karena masing-masing berjuang untuk mewujudkan keinginan agar ideologi golongannya itu diterapkan menjadi ideologi negara. Di samping itu, tiap-tiap partai juga berjuang untuk menguasai pemerintahan dalam rangka melaksanakan ideologi golongannya sendiri. Dalam suasana seperti itu timbul *inner power struggle* yang terus-menerus. Hal itu antara lain tercermin dalam peristiwa-peristiwa seperti berikut: (1) pemerintahan tidak mampu bertahan sampai batas waktu

⁸Lihat Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian di Indonesia*, 1951, hal. 7. Lihat pula Kementerian Penerangan RI, *Almanak Lembaga-lembaga Negara dan Kepartaian*, 1961, hal. 435 dan 439.

yang wajar. Dalam suasana seperti itu, pemerintahan paling lama hanya mampu bertahan selama 8 bulan;⁹ (2) ketika Konstituante memasuki tahap pembahasan mengenai dasar apa yang akan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia, berbagai golongan berjuang untuk menggoalkan ideologinya sendiri menjadi dasar negara. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan mereka dalam perdebatan di dalam persidangan.¹⁰

Di dalam memperdebatkan soal dasar negara yang dikehendaki untuk Republik Indonesia pada sidang-sidang Konstituante antara tahun 1956-1957 dapat diketahui ada tiga ideologi yang diperjuangkan, masing-masing adalah: ideologi Keagamaan (Islam), ideologi Sosial-Ekonomi (Sosialisme), dan tetap Pancasila.¹¹

Golongan-golongan yang menghendaki Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah partai-partai yang berdasarkan ideologi Keagamaan (Islam), masing-masing adalah: Masyumi, NU, PSII, Perti. Mereka yang menghendaki Islam sebagai dasar negara itu menolak Sosialisme dan Pancasila sebagai dasar negara. Sementara itu, golongan-golongan yang menghendaki Sosial-Ekonomi (Sosialisme) sebagai dasar negara adalah PSI dan Murba. Mereka ini menolak Pancasila dan Islam sebagai dasar negara. PKI yang berideologi Marxis mengambil taktik untuk tidak memperjuangkan ideologinya sebagai dasar negara, tetapi "mendukung" Pancasila sebagai dasar negara.

Sedangkan golongan-golongan yang menghendaki Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara adalah: PNI, Parkindo, Partai Katolik, PKI dan partai-partai kecil yang berideologi kebangsaan lainnya. Dalam sidang-sidang selanjutnya ternyata tidak terdapat persesuaian pendapat mengenai apa yang akan dijadikan/ditetapkan sebagai dasar negara. Suasana menjadi kalut karena sebagian besar anggota Konstituante tidak mau lagi menghadiri persidangan. Pihak penguasa waktu itu mengambil inisiatif untuk mengupayakan jalan ke luar melalui suatu Dekrit Kembali ke UUD 1945.

Untuk sementara waktu, dan untuk kepentingan politik sesaat, usaha penyelesaian yang dilakukan oleh almarhum Presiden Soekarno ketika itu dapat

⁹M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasung-Surat* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal. 113. Mengenai "inner power struggle" lihat antara lain Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-kelemahannya* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978).

¹⁰Lihat Konstituante Republik Indonesia, *Risalah Perundingan, 1956-1957* (13 jilid). Lihat pula Wilopo (ed.), *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante* (3 jilid) (Bandung: 1958).

¹¹Konstitusi Republik Indonesia, *ibid.* khususnya jilid VII tahun 1957, hal.575-605.

memberikan harapan baru bagi mantapnya kedudukan ideologi nasional -- Pancasila. Namun beberapa saat kemudian, impian itu tidak muncul. Yang terjadi justru sebaliknya. Pancasila dan UUD 1945 mulai diselewengkan secara berangsur-angsur, sehingga akhirnya hanya dijadikan semboyan kosong belaka, dan sebagai gantinya diisi dengan Nasakom. Demokrasi yang seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dijadikan Demokrasi Terpimpin, kedaulatan yang ada di tangan rakyat diganti dengan suara "penyambung lidah rakyat," Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum dibubarkan oleh Presiden, Presiden diangkat untuk seumur hidup¹² dan sebagainya. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa Dekrit 5 Juli 1959 hanya merupakan penyelesaian *politik legalistik*. Sementara itu kehidupan *politis ideologis* yang kacau itu tidak tersentuh sama sekali. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Dekrit justru memperlihatkan adanya "kompromi-kompromi" atas beberapa ideologi yang pada masa persidangan Konstituante menunjukkan pertentangan secara tajam. Hal itu tampak dalam konsepsi Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) sebagai pelaksanaan Pancasila.

Di samping terjadi "kompromi-kompromi" ideologi yang memang sulit untuk dipersatukan,¹³ problem ideologis pada masa setelah Dekrit 5 Juli yang terkenal dengan Demokrasi Terpimpin itu juga disebabkan karena PKI yang dalam masa perdebatan di sidang Konstituante Republik Indonesia "mendukung" Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, ternyata hanya merupakan taktik. Pancasila hanya dipandang sebagai alat. Hal itu tercermin dari pidato Ir. Sakirman yang menyatakan seperti berikut:

"Pendeknya Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia yakin bahwa Panca Sila di dalam masa transisi ini, yaitu masa peralihan dari jaman setengah kolonial dan setengah feodal ke jaman nasional, ke jaman kemerdekaan penuh di lapangan politik dan ekonomi seluruh Indonesia, *bisa merupakan alat yang penting* dan menentukan dalam perjuangan untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan yang meluas di kalangan rakyat banyak."¹⁴

Problem ideologi itu membawa serta permasalahan mengenai ketidakjelasan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup

¹²Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974). hal. 7-8.

¹³Ki Hadjar Dewantara pernah menyatakan demikian: "Janganlah menyatukan apa yang tidak dapat disatukan, janganlah menyatukan apa yang tidak perlu disatukan, kesatuan dalam dasar dan asas, dalam pokok-pokoknya cukuplah, bahkan itulah satu-satunya syarat untuk dapat menggalang persatuan dan kesatuan yang kokoh dan abadi." (lihat Dr. A.M.W. Pranarka, "Relevansi Ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara Dewasa Ini dan di Masa Mendatang," ulasan yang disampaikan pada pengukuhan Konsorsium LPK Sarjana Wiyata Taman Siswa Periode 1984-1988 di Pendopo Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta tanggal 20 Mei 1984), hal. 7.

¹⁴Lihat pidato Ir. Sakirman dalam Konstituante Republik Indonesia, *Risalah Perundingan*, tahun 1957, Jilid V, hal. 263 (cetak miring dari penulis).

bangsa, bahkan tata urutan dan bunyi rumusan sila-sila Pancasila juga kacau. Melihat suasana kehidupan ideologi nasional yang kacau-balau seperti itu, maka Orde Baru bangkit dengan konsepsi dasar dan tekad seperti berikut: (1) bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen; (2) bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional secara terencana.¹⁵

PERANAN ORDE BARU DALAM PEMBANGUNAN IDEOLOGI

Kiranya tidak seorang pun dapat memungkiri bahwa sejarah kelahiran dan perkembangan Orde Baru itu terkait erat dengan peranan eksponen-eksponen Orde Baru, khususnya Jenderal TNI Soeharto. Bukti sejarah menunjukkan bahwa dalam suasana kehidupan bangsa dan negara yang kacau ketika itu, Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS (Soekarno), tanggal 11 Maret 1966 memberikan Surat Perintah kepada Jenderal TNI Soeharto (ketika itu masih berpangkat Letnan Jenderal dan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat) untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi: (1) mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketertentangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi; (2) mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya; (3) supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas.¹⁶

Sehari setelah menerima Surat Perintah itu, Jenderal TNI Soeharto antara lain mengambil tindakan-tindakan seperti berikut: (1) membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seases/berlindung/bernaung di bawahnya, dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia; (2) mengamankan menteri-menteri/tokoh-tokoh yang terlibat dalam G-30-S, melakukan petualangan

¹⁵Lihat A.M.W. Pranarka, *Sejarah Perkembangan Pemikiran Tentang Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar Negara dan Sumber Hukum*, disertasi untuk meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1984, hal. 268.

¹⁶Lihat Surat Perintah 11 Maret 1966 dalam *Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS Tanggal 11 Maret 1966 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Penerbitan Khusus, No. 406.

politik dan/atau petualangan ekonomi, sebagai langkah rintisan untuk menyehatkan kehidupan politik, pemerintahan dan ekonomi; (3) mengamankan terselenggaranya Sidang Umum IV MPRS, untuk menyalurkan kehendak rakyat secara konstitusional dan untuk mengembalikan kehidupan demokrasi Pancasila secara sehat dan wajar.¹⁷

Setelah Jenderal TNI Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 (pasal 4) tertanggal 12 Maret 1967, pernyataan dan penegasan yang pertama-tama dikemukakan kepada rakyat secara mendasar melalui pidatonya di depan sidang DPR-GR tanggal 16 Agustus 1967 adalah hal-hal yang berkenaan dengan ideologi dan pembangunannya. Pandangan-pandangan dan penegasan-penegasan itu antara lain seperti berikut ini: "Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itulah fungsi dan tujuan Orde Baru."¹⁸ Selanjutnya ditegaskan pula bahwa:

"Sungguh suatu tragedi bagi Rakyat dan Bangsa Indonesia yang pada tahun 1959 mendukung dengan penuh harapan 'dekrit kembali kepada UUD 1945,' tetapi ternyata bahkan menjerumuskan Rakyat dan Bangsa Indonesia, kepada penderitaan lahir dan batin, yang mencapai klimaknya dengan pemberontakan G-30-S/PKI. Pancasila telah diselewengkan, dan kehilangan kemurniannya dengan dilahirkannya konsepsi Nasakom, yang mengikutkan dan memasukkan komunisme ke dalam pelaksanaan Pancasila Agama diselewengkan untuk kepentingan politik."¹⁹

Mengenai penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila ditegaskan seperti berikut ini:

"Sila Perikemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan; hak-hak asasi manusia hampir-hampir lenyap, sebab semuanya ditentukan oleh kemanusiaan penguasa. ... Sila Kebangsaan dan persatuan dalam prakteknya luntur, karena ada aliran-aliran yang menundukkan diri kepada ideologi lain. ... Sila Kedaulatan Rakyat menjadi kabur; yang ada adalah 'kedaulatan' pemimpin. Sila Keadilan Sosial makin jauh; sebab kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai untuk proyek-proyek 'mercu-suar' yang merusak ekonomi Rakyat dan Negara. Sistem 'ekonomi terpimpin' dalam praktek menjadi 'sistem lisensi' yang hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan penguasa."²⁰

Pada bagian lain pidatonya, Pejabat Presiden menegaskan bahwa:

"Apabila kami dalam kesempatan ini mengemukakan secara terperinci bentuk-bentuk penyelewengan Orde Lama, itu adalah sekedar mengingatkan pada kita, bahwa Orde Baru

¹⁷Lihat *Keterangan Pemerintah pada Sidang Pleno DPR-GR Tanggal 4 Maret 1967 Mengenai Penyerahan Kekuasaan Pemerintah*, Departemen Penerangan RI, Penerbitan Khusus, No. 438, hal. 10.

¹⁸Lihat *Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di Depan Sidang DPR-GR Tanggal 16 Agustus 1967*, Departemen Penerangan RI, Penerbitan Khusus, No. 461, hal. 12.

¹⁹*Ibid.*, hal. 12.

²⁰*Ibid.*, hal. 12-13.

yang bertekad mengadakan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh, mengadakan ordening-ordening penertiban dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, tidak akan lagi mengulangi, tidak terjerumus lagi ke dalam keadaan praktek-praktek yang demikian buruknya itu.”²¹

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Jenderal TNI Soeharto yang juga amat mendasar dalam usaha pembangunan ideologi adalah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/1968 tertanggal 13 April 1968 yang isi pokoknya adalah penegasan mengenai tata urutan dan rumusan sila-sila Pancasila dalam penulisan/pembacaan atau pengucapan. Dalam instruksi ini ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan sila-sila Pancasila adalah sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.²²

Dengan adanya tindakan-tindakan seperti telah diuraikan di depan kemudian dapat dilihat bahwa kedudukan ideologi nasional Pancasila mulai ada kejelasan posisi dan isinya, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Apabila posisi dan isi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup maupun kepribadian bangsa Indonesia itu dilihat dari segi prosesnya, maka dalam masa Orde Baru ini tampak adanya tiga tahapan penting yang dapat disebut sebagai tiga tahap pembangunan ideologi. Tiga tahap pembangunan ideologi itu dapat diuraikan seperti di bawah ini.

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN IDEOLOGI NASIONAL PANCASILA

Dalam perjalanan sejarah kehidupan Orde Baru sejak kelahirannya sampai sekarang, usaha-usaha untuk memantapkan ideologi nasional Pancasila itu tampak dilaksanakan secara terus-menerus melalui tahap demi tahap. *Tahap pertama* adalah tahap *pengamanan* ideologi nasional Pancasila itu dari paham-paham lain yang negatif, bahkan yang merongrong kehidupan ideologi Pancasila itu sendiri. Tahap pengamanan ini dilanjutkan dengan tahap berikutnya berupa *usaha-usaha untuk memantapkan kedudukannya secara konstitusional*. Ini merupakan *tahap kedua*. Setelah mantap kedudukannya, Pancasila perlu *dilaksanakan secara nyata* melalui pengamalan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari supaya dengan demikian Pancasila tidak hanya menjadi ”benda keramat.” Usaha-usaha untuk melaksanakan Pancasila itu dapat disebut sebagai *tahap ketiga* dari serangkaian usaha pembangunan ideologi.

Mengenai bentuk-bentuk usaha pembangunan ideologi nasional pada tahap pertama (tahap pengamanan) dapat disebut misalnya pembubaran PKI

²¹*Ibid.*, hal. 14.

²²Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968.

dengan segenap ormas yang berlandung di bawahnya serta organisasi-organisasi yang senafas dengannya. Usaha ini dilanjutkan terus pada masa-masa berikutnya. Di antaranya adalah dalam bentuk pemberian ancaman kepada sisa-sisa G-30-S/PKI maupun bekas tahanan PKI yang sudah dibebaskan yang antara lain tercermin dalam penegasan-penegasan pemerintah seperti berikut: (1) "Tapol Golongan C yang berjumlah sekitar 8.000 orang telah dikembalikan seluruhnya ke masyarakat. Tetapi jika mereka berusaha untuk menghidupkan PKI lagi atau mengacau, pemerintah pasti mengambil tindakan lebih tegas";²³ (2) "... kepada para bekas tahanan yang telah diberi kesempatan untuk memasyarakat kembali agar mau belajar dari pengalaman kesesatan mereka di waktu yang lalu dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh Orde Baru, kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Namun apabila ternyata ada yang menyalahi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah itu dan mencoba menghidup-hidupkan lagi aspirasi PKI dan menimbulkan keonaran dalam masyarakat, maka alat-alat keamanan pasti tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan."²⁴

Di samping pengamanan dari sisa-sisa G-30-S/PKI, Pancasila juga diamankan dari ideologi atau paham lain yang mengancam. Hal itu misalnya tercermin dalam penegasan pemerintah seperti berikut:

"ABRI bersama-sama dengan seluruh kekuatan rakyat yang setia dan teguh kepada dasar falsafah negara Pancasila masih tetap mempunyai tugas untuk mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari bahaya laten sisa-sisa dan unsur-unsur PKI dan atau kekuatan ekstrem anti Pancasila lainnya."²⁵

Usaha itu bahkan digalakkan terus sampai tahun 1985, dan kemungkinan akan tetap dilanjutkan dalam tahun-tahun berikutnya. Hal itu tercermin misalnya adanya penataran kewaspadaan nasional.

Sementara itu, bentuk-bentuk usaha yang dilakukan Orde Baru pada tahap kedua, yakni tahap pemantapan kedudukan Pancasila secara konstitusional tampak misalnya dalam pembuatan ketetapan-ketetapan MPR, undang-undang, maupun peraturan-peraturan perundangan di bawahnya yang mengacu kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Di antaranya adalah Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS No.

²³Lihat Pidato Pertanggungjawaban Presiden RI/Mandataris MPR-RI kepada Sidang Umum MPR tanggal 12 Maret 1973.

²⁴Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1979, dalam *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara RI, Triwulan III, tahun 1979, hal. 317-318.

²⁵*Ibid.*, hal. 317.

XXV/MPRS/1966. Ketetapan-ketetapan ini terjadi pada masa-masa awal kebangkitan Orde Baru. Sementara itu, ketetapan-ketetapan MPR yang dihasilkan oleh MPR hasil Pemilu di antaranya adalah ketetapan-ketetapan MPR tentang Tata Tertib tahun 1973, 1978 dan 1983, ketetapan-ketetapan MPR tentang GBHN 1973, 1978, maupun 1983, ketetapan-ketetapan MPR tentang Pemilu serta ketetapan MPR tentang Referendum.

Sedangkan bentuk-bentuk usaha pelaksanaan Pancasila tampak misalnya dibuatnya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Pelaksanaan Pancasila yang dilanjutkan dengan penataran-penataran P-4 kepada segenap masyarakat bangsa Indonesia. Usaha itu dilanjutkan dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN serta UU No. 3/1985 tentang Perubahan atas UU No. 3/1975 mengenai Partai Politik dan Golongan Karya dan UU No. 5/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenai usaha-usaha pembangunan ideologi nasional sampai saat ini ada pendapat yang menyatakan bahwa:

"Jika perjuangan kita dahulu berkisar pada usaha mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila, sejak MPR menetapkan P-4 pada tahun 1978, perjuangan itu ditingkatkan menjadi gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila."²⁶

Selanjutnya, dengan adanya Ketetapan MPR tahun 1983 yang menegaskan bahwa Pancasila adalah asas politik dan pembangunan nasional dipandang sebagai pengamalan Pancasila, dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia berusaha membulatkan kesatuan pandangan dan sikapnya terhadap Pancasila, baik sebagai dasar negara, pandangan hidup maupun ideologi bangsa yang selama ini terasa belum tuntas. Hal ini berarti pula bahwa titik berat perjuangan bangsa telah makin maju, yakni: dari pengamalan Pancasila ke pengamalan Pancasila.²⁷ Sampai seberapa jauh hal itu akan dapat dicapai kiranya memang masih harus menunggu proses perjalanan waktu di samping juga ditentukan oleh sikap setiap insan Indonesia di dalam menanggapi tugas pembangunan ideologi tersebut pada masa-masa selanjutnya.

PROSPEK KEHIDUPAN IDEOLOGI NASIONAL DI MASA MENDATANG

Melihat posisi ideologi nasional yang sangat kukuh setelah dilakukan berbagai langkah pembangunannya, mungkin orang akan mengatakan bahwa di

²⁶Lihat Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983, *ibid.*, hal. 37.

²⁷Lihat Pidato Akhir Tahun 1983 Presiden Republik Indonesia.

masa mendatang tidak akan muncul lagi suatu problem ideologi. Pendapat itu kemungkinan dapat benar, tetapi kemungkinan juga dapat salah oleh karena permasalahannya memang belum dialami pada saat sekarang. Namun apabila fenomena kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak dicanangkannya pembangunan nasional pada umumnya, dan dinamika kehidupan politik pada khususnya diteliti secara lebih cermat, tampaknya di masa yang akan datang masih tetap akan terdapat problem ideologis.

Walaupun sejak bangkitnya Orde Baru sampai sekarang kita saksikan adanya usaha-usaha pembakuan dan penataan yang menyangkut bidang ideologi nasional, baik di tingkat formal maupun non-formal, tetapi tidak berarti bahwa problem ideologi itu menjadi tuntas sama sekali. Problem itu tetap masih akan terjadi, baik karena dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia sendiri maupun karena pengaruh dari situasi internasional.

Apabila dinamika kehidupan bangsa dan negara sejak ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi-organisasi politik pada umumnya, khususnya bagi partai-partai politik dan golongan karya oleh MPR dalam sidang umumnya bulan Maret 1983 yang kemudian diikuti dengan penjabarannya dalam bentuk undang-undang kita simak secara lebih teliti, dalam dirinya masih terdapat potensi bagi terjadinya problem ideologi tersebut. Melalui pendalaman atas pendapat-pendapat yang terungkap di permukaan media-media cetak maupun dalam diskusi-diskusi sejak ditetapkannya Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi organisasi-organisasi kekuatan sosial-politik dan organisasi kemasyarakatan dapat diketahui adanya pro dan kontra di antara sesama komponen bangsa/masyarakat Indonesia. Misalnya ada pendapat yang menyatakan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas akan menjurus ke sistem partai tunggal, setidaknya-tidaknya arti sistem kepartaian yang mengakui eksistensi lebih dari satu partai bisa dikatakan haps.²⁸ Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa penyeragaman asas bagi kekuatan-kekuatan sosial politik berarti mengingkari keragaman/kebhinnekaan yang ada dalam masyarakat.²⁹ Di samping itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan-kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan akan mengabaikan aspek demokrasi, hak asasi dan kebebasan.³⁰

Apabila problem di depan menyangkut hubungan antara ideologi dengan politik, maka di samping itu masih pula terdapat problem ideologi dengan ekonomi. Hal itu misalnya terungkap dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan

²⁸Lihat M. Rusli Karim, *op. cit.*, hal. 222-223.

²⁹*Ibid.*, hal. 220.

³⁰Lihat misalnya "Pokok-pokok Pikiran GMKI" dalam *Sinar Harapan*, 17 Maret 1984.

seperti berikut: sampai seberapa jauh pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia selama ini dapat dipandang sebagai pengamalan Pancasila.³¹ Ada pula sementara pendapat yang mempertanyakan: bagaimanakah Pancasila itu dapat dijabarkan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan.

Uraian-uraian di depan adalah uraian permasalahan yang kemungkinan masih akan timbul dari dinamika kehidupan bangsa Indonesia di dalam negeri sendiri. Di samping masih menghadapi permasalahan di dalam negeri, bangsa Indonesia sesuai dengan sifat bangsa yang terbuka, akan pula menghadapi gejolak-gejolak ideologi yang melanda umat manusia di dunia dewasa ini. Di satu pihak ada pandangan yang menyatakan bahwa "ideology is dead," era ideologi telah mati. Tetapi di lain pihak kita juga menyaksikan bangkitnya berbagai macam ideologi di dunia, baik itu ideologi sekular (non-keagamaan) maupun ideologi keagamaan.³² Hal itu misalnya liberalisme, kapitalisme, sosialisme, ideologi pembebasan maupun revolusi Islam, konflik ideologis antara Islam dan sekularisme dalam pemerintahan di banyak negara Muslim dan lain sebagainya. Problem ideologi itu tampaknya tidak mustahil akan mempengaruhi kehidupan ideologi nasional Pancasila di masa-masa mendatang.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini dapat disaksikan pula adanya usaha-usaha dari berbagai ideologi untuk memberikan konsepsi/sumbangan pemikirannya mengenai bagaimana memecahkan masalah-masalah ekonomi yang melanda dunia sejak dasawarsa 1980-an. Ideologi keagamaan misalnya berusaha memberikan konsepsi penyelesaian kesulitan ekonomi dengan sistem ekonomi keagamaan, theologi pembebasan dan lain sebagainya. Sementara itu, ideologi sekular memberikan konsep pemecahan kesulitan ekonomi dalam bentuk misalnya liberalisasi sistem ekonomi, proteksionisme, strukturalisme dan lain sebagainya.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas menunjukkan bahwa bagi bangsa Indonesia di masa mendatang masih harus siap dengan problem ideologi. Dengan kata lain problem ideologi itu masih tetap akan dihadapi walaupun bangsa Indonesia sudah berusaha keras untuk menyelesaikannya selama 20 tahun terakhir ini. Di bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila dibutuhkan sifat kritis dan kreatif karena Pancasila akan dihadapkan pada kenyataan-kenyataan perubahan yang makin saling kait-mengait sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini.

³¹Lihat *Kompas*, 1 dan 2 Agustus 1983.

³²Lihat *Termin of Reference Sarasehan Menyongsong Lima Windu Kemerdekaan Indonesia* Jakarta, 24-25 Juli 1985, hal. 5-7.

CATATAN PENUTUP

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan beberapa catatan seperti berikut. *Pertama*, selama Orde Baru pembangunan bidang ideologi telah memperoleh perhatian yang mendalam. Beberapa hal dapat dikatakan merupakan hasil pembangunan ideologi selama Orde Baru itu, di antaranya adalah: dilakukannya koreksi secara total dan menyeluruh atas penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama, ditetapkannya tata urutan dan susunan sila-sila dari Pancasila seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Instruksi Presiden No. 12/1968), ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia (Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4), ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ditetapkannya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN dan UU tentang Perubahan Undang-Undang Papol dan Golkar dan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Kedua, dari pengalaman masa lalu dapat dicatat bahwa terjadinya "rongrongan" dan penyelewengan terhadap Pancasila disebabkan karena pihak-pihak yang menentang Pancasila berada dalam sistem penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara atau singkatnya dapat disebut "within the system." Hal itu misalnya pengalaman selama masa Demokrasi Parlementer yang membuahkan pertentangan antar kekuatan sosial politik bangsa Indonesia mengenai dasar negara serta pengalaman selama masa Demokrasi Terpimpin dengan konsepsi Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) sebagai pelaksanaan Pancasila.

Ketiga, dari telaah yang dilakukan dapat dikatakan bahwa melalui perjuangan yang panjang, Pancasila diusahakan pemurniannya. Pemurnian itu menyangkut baik soal isi, soal wujud maupun pelaksanaannya. Di samping itu juga dibersihkan dari pengaruh-pengaruh negatif ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Dengan demikian faktor-faktor ancaman diusahakan dikeluarkan dari sistemnya sendiri.

Keempat, apabila dinamika kehidupan politik dan ideologi pasca Sidang Umum MPR 1983 ditelaah secara lebih cermat kiranya dapat dikatakan bahwa ancaman terhadap ideologi nasional Pancasila itu belum habis sama sekali. Ancaman terhadap Pancasila masih tetap ada. Mengenai hal ini, Sarwono Kusumaatmadja misalnya menyatakan seperti berikut:

"Pengamalan Pancasila di masa mendatang tidak mustahil harus kita laksanakan dalam suasana yang jauh dari ideal, di mana akan terdapat kondisi-kondisi obyektif yang dapat memancing orang untuk memikirkan alternatif-alternatif lain. Kemungkinan dimasyarakatkannya alternatif lain tersebut tidak dapat diremehkan dalam abad modern ini karena tidak

ada pilihan lain kecuali harus bersikap terbuka, di samping ideologi nasional itu sendiri juga memang bersifat terbuka. Dalam hubungan ini berarti bahwa kita harus terbuka terhadap gagasan-gagasan yang datang dari pihak lain melalui berbagai cara. Persoalan ini perlu lebih dalam kita amati oleh karena dengan telah ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berarti berkenaan dengan bentuk dan paham kenegaraan serta kemasyarakatan maupun kebangsaan kita telah jelas dan tidak menjadi permasalahan lagi itu konflik politis-ideologis telah diberikan solusi. Walaupun demikian, solusi itu masih akan menghadapi berbagai tantangan, dan tantangan itu bukan makin ringan, tetapi justru makin berat oleh karena apabila di kemudian hari nanti terjadi konflik lagi, maka konflik itu akan langsung mengenai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri, tameng/buffer sudah tidak ada lagi.”³³

Kelima, satu hal yang kiranya tidak dapat diabaikan adalah bahwa agar problem ideologi di masa depan dapat dihindarkan, dan walaupun problem ideologi itu terjadi dapat diselesaikan dengan baik, maka diperlukan usaha yang lebih besar untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang ideologi nasional. Hal itu dapat ditempuh misalnya dengan mempertinggi derajat kemandirian masyarakat dalam pengamalan Pancasila, tidak hanya menganalkan lembaga-lembaga politik formal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat sendiri akan menyadari betapa pentingnya peningkatan kesadaran persatuan kesatuan berdasarkan kepada ideologi kebangsaannya itu. Kesadaran ideologis seperti ini akan merupakan sumber penangkal yang sangat berharga.

³³Lihat Sarwono Kusumaatmadja, “Masalah dan Prospek Kelembagaan di Bidang Politik,” makalah disampaikan dalam Sarasehan Menyongsong Lima Windu Kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 24-25 Juli 1985, dalam *Suara Karya*, 25-26 Juli 1985.

Masalah dan Prospek Kelembagaan di Bidang Politik

Sarwono KUSUMAATMADJA

Di masa lalu, kehidupan politik di tanah air memperlihatkan perkembangan-perkembangan berikut: *pertama*, pada jaman demokrasi parlementer, dipertarungkan konsep-konsep politik yang pada dasarnya berkisar pada paham serta bentuk negara. Karena bentuk serta paham negara merupakan isyu yang amat fundamental, maka konflik politik di masa itu amat sengit; kenyataan bahwa perdebatan yang demikian fundamental terjadi pada saat di mana bangsa kita masih muda dengan segala kekurangannya, menyebabkan krisis demi krisis politik bermunculan dan dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme darurat melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. *Kedua*, di dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita melihat adanya usaha untuk menuntaskan masalah-masalah fundamental di atas dengan mengikat komitmen bangsa pada Pancasila dan UUD 1945. Usaha tersebut tidak berhasil, karena kenyataan obyektif yaitu bahwa kehidupan politik masih bersifat multi ideologi, sesuatu yang muskil dipersatukan dalam Pancasila. Kita boleh mengecam Bung Karno dengan politik Nasakomnya, namun jika kita merenungkan kembali pilihan-pilihan yang terbuka bagi dirinya pada waktu itu, setidaknya kita dapat memahami betapa sulitnya berhadapan dengan faktor obyektif berupa hadirnya secara sah kekuatan-kekuatan riil yang satu dengan lainnya secara antagonistik bertentangan. Konflik ideologi yang tajam merupakan konsekuensi dari perkembangan politik di masa itu, dan puncak konflik tersebut meletus dengan Pemberontakan G-30-S/PKI.

Jika kita mengambil hikmah dari kejadian masa lalu tersebut dari sudut kelembagaan, maka secara menyeluruh dapat ditarik suatu kesimpulan bersama dari dua jaman berbeda di atas, yaitu bahwa kelembagaan politik di masa itu ternyata tidak dapat berfungsi dalam "management of conflict," atau dalam memelihara keseimbangan antara konflik dengan konsensus. Orde Baru telah membuktikan dirinya mampu dalam "management of conflict"

tadi. Hal ini disebabkan karena kemampuannya untuk mengambil pelajaran sejarah yang tepat, dan juga berkat kepemimpinan yang efektif, termasuk efektif dalam mengambil langkah-langkah yang sudah lama ditunggu oleh bangsa kita, yaitu pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dari segi pembangunan politik maka prestasi terbesar dari Orde Baru adalah terjaminnya legitimasi kelembagaan politik Orde Baru, baik supra maupun infrastruktur, serta ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa masalah-masalah penting di bidang politik, baik yang bersifat fundamental berupa paham serta bentuk negara, maupun yang bersifat struktural yaitu masalah kelembagaan, telah selesai. Walaupun dalam beberapa hal dapat dikatakan bahwa penyelesaian tersebut berada dalam tahapnya yang dini, yaitu tahap legal dan formal. Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan politik adalah rangkaian yang tidak henti antara konflik dengan konsensus. Dari segi ini, maka lembaga-lembaga politik berperan untuk menangani konflik demi tercapainya konsensus. Peran ini diemban sesuai dengan fungsi yang melekat pada tiap lembaga politik apakah supra maupun infrastruktur sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh konstitusi. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas mempunyai makna bahwa sifat konflik politik sudah bergeser, yaitu bukan lagi mengenai paham dan bentuk negara, tetapi mengenai pilihan-pilihan yang harus ditempuh atas dasar yang sekarang sudah diakui sama, yaitu Pancasila, dan atas dasar ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang sama pula yaitu UUD 1945. Di masa yang akan datang kelembagaan politik kita akan dihadapkan pada serangkaian konflik dan konsensus terus-menerus yang terjadi dalam menangani pilihan demi pilihan yang timbul di atas kesamaan dasar di atas. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali membangun kelembagaan politik yang senantiasa dapat efektif, karena taruhannya adalah besar, yaitu Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Krisis politik yang besar di masa yang akan datang dapat mengundang terpikirkannya alternatif-alternatif lain sehingga kehidupan politik kita dapat mengalami regresi ke masa-masa lalu yang penuh gejolak. Stabilitas politik yang telah demikian lama kita nikmati memang mengandung hikmah, yaitu terciptanya iklim yang memungkinkan terwujudnya perikehidupan di segala bidang yang makin baik. Tetapi di sisi lain dapat membuai kita untuk melupakan pahit getirnya sejarah pertumbuhan bangsa, serta memunculkan gagasan-gagasan yang terlepas dari konteks kebangsaan kita, serta tidak konsisten dengan arah pertumbuhan selama ini.

Krisis politik yang besar di masa yang akan datang hanya dapat dihindarkan, jika pembangunan politik dapat kita tempatkan dalam konteks kontinuitas serta pembaharuan. Hal ini menuntut stabilitas serta dinamika sekaligus. Kontinuitas kita perlukan supaya perjalanan sejarah bangsa selalu

konsisten dengan cita-cita kemerdekaan kita; sedangkan dinamika pembaharuan selalu juga diperlukan karena pembaharuan adalah tuntutan obyektif dari bangsa yang membangun. Kontinuitas serta pembaharuan dapat dijamin lewat terciptanya sistem politik yang efektif dalam arti bahwa sistem politik tadi, selain konsisten berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga mampu menghadapi tantangan-tantangan jaman dengan daya adaptasi yang sepadan. Dengan daya adaptasi yang demikian, maka dapat dihindarkan kecenderungan untuk memelihara status quo semata-mata, yang pada gilirannya hanya mampu memelihara kehidupan politik dengan penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Penggunaan kekuasaan yang berlebihan pada gilirannya pula akan menciptakan perlawanan yang semakin keras, sehingga kekuasaan yang bersikap terbelakang akhirnya juga tidak akan efektif, karena tidak lagi mampu menangani konflik hanya sebagai konflik politik semata-mata. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang karena bentuk serta paham negara sudah tidak lagi menjadi masalah, maka kita perlu berusaha supaya Pancasila dan UUD 1945 kita lestarikan dengan upaya pembangunan politik yang dinamis dan demokratis sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat yang demikian beraneka ragam dan tuntutan-tuntutan yang meningkat dapat diolah dalam kehidupan politik kita.

Dewasa ini kita mempunyai cukup alasan untuk bersikap optimis bahwa perkembangan kehidupan politik menuju ke arah yang terbuka dan demokratis karena perdebatan-perdebatan politik yang kita saksikan selama pembahasan kelima RUU bidang politik telah menunjukkan arah yang wajar dan sehat. Sebagai contoh, berkali-kali Presiden Soeharto menekankan dalam berbagai kesempatan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan dogmatis. Demikian juga para politisi yang merupakan pembawa ide Pancasila sebagai satu-satunya asas mengaitkan Pancasila sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan kehidupan demokratis. Para cendekiawan kita dari berbagai latar belakang budaya telah sama-sama memberikan pembenaran bahwa Pancasila adalah suatu ideologi yang terbuka, yang bukan saja berakar dari budaya bangsa namun juga mampu menyerap hal-hal yang menguntungkan pertumbuhan bangsa dari berbagai paham yang hidup di dunia ini. Di pihak lain kita juga sudah kurang mendengar adanya nada-nada yang bersikap defensif mengenai Pancasila, yaitu misalnya ucapan bahwa Pancasila bukanlah isme ini atau itu, tanpa mampu menjelaskan apa sebenarnya Pancasila itu. Kecenderungan untuk bersikap totaliter mengenai Pancasila, sehingga mempancasilakan segala hal termasuk sepak bola juga sudah lama tidak kita lihat. Optimisme ini layak juga kita tampilkan jika kita lihat kembali bahwa proses diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bukanlah proses pemaksaan tetapi ditempuh melalui proses yang evolutif. Gagasan untuk menawarkan Pancasila sebagai satu-

satunya asas pernah dikemukakan oleh Bung Karno setelah Dekrit Presiden, namun ditampik oleh PKI. Selama Orde Baru, gagasan ini telah menyatu dengan perjuangan Orde Baru sejak awal. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Pancasila akhirnya diterima sebagai satu-satunya asas karena kesadaran sejarah bahwa kita memang tidak mempunyai alternatif lain. Proses penerimaan asas tadi tidaklah sepi dari konflik namun konflik yang terjadi mampu ditangani dalam kelembagaan politik kita. Usaha-usaha untuk menciptakan konflik yang keras dalam masyarakat mengenai masalah ini ternyata tidak mendapat dukungan luas dari masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan bukti bahwa legitimasi lembaga-lembaga politik kita sudah bersifat nyata.

Daya adaptasi sistem politik kita juga terbukti dari pembaharuan yang dilakukannya menyangkut susunan lembaga-lembaga perwakilan kita. Susunan tersebut diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang disusun sebelum Pemilu 1971, yaitu melalui UU No. 16 Tahun 1969, di mana $\frac{1}{3}$ anggota MPR diangkat dari Golongan Karya ABRI. Pengangkatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa Pemilu tidak akan menghasilkan suatu susunan yang memungkinkan dipersoalkannya kembali UUD 1945. Proses pembudayaan Pancasila selama Orde Baru serta meningkatnya kesadaran akan Pancasila sebagai satu-satunya alternatif ideologi menyebabkan perlunya ditempuh cara-cara yang lebih demokratis dalam menjamin bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun. Oleh karena itu diputuskan bahwa di masa yang akan datang, perubahan terhadap UUD hanya dapat dilakukan melalui referendum. Dengan adanya mekanisme referendum itu, maka pengangkatan dalam lembaga perwakilan dapat dikurangi secara relatif dan adanya pengangkatan dititikberatkan untuk mewadahi pengakuan kita semua terhadap fungsi sosial politik ABRI. Suasana keterbukaan dalam merumuskan ide-ide politik serta kecenderungan adaptif dari sistem politik kita menunjukkan bahwa suatu tradisi politik yang penting mulai membudaya dalam masyarakat, yaitu kemauan untuk bersikap inovatif kendatipun sikap inovatif itu mungkin hanya memenuhi selera pembaharuan yang terbatas saja. Jika keterbukaan serta kemampuan adaptasi yang sifatnya moderat ini kita lihat sebagai awal terciptanya tradisi politik kita, maka kita pun patut optimis bahwa di masa yang akan datang tuntutan akan kontinuitas serta pembaharuan sekaligus dapat senantiasa dipenuhi.

Indikasi yang dapat kita catat untuk mendukung adanya kecenderungan untuk pemantapan peranan kelembagaan adalah adanya pembenahan fungsi dari aparatur pemerintah di bidang politik maupun ekonomi dalam rangka pelaksanaan Pancakrida Kabinet Pembangunan IV. Di bidang politik terlihat adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk membatasi peranannya dalam penataan infrastruktur politik sejauh hal itu masih sesuai dengan peranan pemerintah sebagai pembina politik dalam negeri menurut ketentuan hukum

yang ada. Memang terdapat kalangan politisi yang tidak awas akan perkembangan ini, dan kemudian menstimulasi pertentangan intern dalam rangka memanfaatkan intervensi pemerintah untuk keuntungan kelompoknya. Namun ternyata ulah yang demikian tidak lagi mendapat tanggapan yang sebanding dengan jerih payah yang diperlihatkan. Hal lain yang positif adalah penitikberatan fungsi dari Kopkamtib dewasa ini sebagai aparatur sekuriti. Di masa lalu ada kesan yang kuat bahwa lembaga Kopkamtib tidak hanya berfungsi sebagai aparatur sekuriti saja namun juga memegang peranan sebagai manajer krisis, di mana suatu lembaga yang mengalami kesulitan dalam mengemban tugas secara semestinya kemudian untuk sementara "diambil alih" oleh Kopkamtib. Walaupun mungkin ada kasus di mana kecenderungan ini dapat dimengerti, namun kebiasaan seperti ini jika dibiarkan dapat menyebabkan hilangnya kapasitas lembaga-lembaga kita untuk berfungsi baik. Belakangan ternyata kebiasaan-kebiasaan yang bersifat intervensi yang disfungsional semacam ini sudah hilang. Di bidang ekonomi terdapat usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menata aparatur dalam menghilangkan penghambat-penghambat yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Walaupun tindakan-tindakan ini patut dipuji namun masih ada perasaan yang luas di masyarakat yang khawatir bahwa tindakan ini semata-mata bersifat reaktif terhadap gejala resesi dunia. Kekhawatiran ini timbul karena pembenahan yang terjadi menyangkut sektor-sektor yang telah lama dituntut untuk berlaku lebih efisien terlepas dari adanya kesulitan ekonomi yang kita hadapi.

Jika ingin disimpulkan dari uraian di atas apa yang harus dicapai dalam kelembagaan kehidupan politik kita maka dapat dikatakan bahwa penataan di bidang kelembagaan politik perlu diteruskan dalam semangat yang tampak selama ini, yaitu keterbukaan, daya adaptasi terhadap tuntutan lingkungan serta kebutuhan untuk berperan secara fungsional. Tuntutan akan kontinuitas serta pembaharuan sekaligus mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang timbul haruslah bersifat gradual dan konsisten. Gradual dalam arti kata, bahwa lembaga-lembaga politik kita hanya dapat diharapkan berfungsi jika kepemimpinannya dapat dipahami oleh taraf kesadaran masyarakat yang umum. Seperti halnya dinyatakan dalam pepatah Minang bahwa kepemimpinan itu cukup "ditingkatkan seranting dan didahulukan selangkah." Kepemimpinan politik sekalipun mungkin memenuhi persyaratan yang ideal, akan terasing dari masyarakat lingkungannya jika ingin mencapai taraf yang mungkin cocok untuk tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi. Karena demokrasi dalam pengertiannya yang cangguh, sebagai suatu misal, hanya dapat berfungsi baik dalam suatu masyarakat di mana disiplin sosialnya sudah tinggi dan di mana tingkat kemandirian anggota masyarakatnya sudah memadai. Sebaliknya kepemimpinan lembaga politik akan tidak dihormati masyarakat, malahan akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial jika kepemim-

pinan tersebut tidak sensitif terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut kualitas kepemimpinan yang lebih baik serta kelembagaan yang lebih responsif. Konsistensi diperlukan supaya terdapat perkembangan yang seimbang di antara berbagai lembaga politik yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketimpangan dalam peranan dan fungsi akan menimbulkan potensi konflik antar lembaga di luar aturan permainan yang wajar dan lazim, sehingga mengundang adanya intervensi yang bersifat disfungsional dari lembaga politik yang relatif lebih dominan. Di samping itu, inkonsistensi akan menciptakan iklim ketidakpastian dalam masyarakat karena tidak terdapatnya suatu kecenderungan umum yang dapat dijadikan tolok ukur untuk bertindak. Konsistensi juga dituntut dalam mengembangkan fungsi dan peran lembaga politik sesuai dengan sifat yang melekat pada lembaga itu, sesuai dengan isi maupun jiwa UUD 1945.

Selama ini peranan dominan dalam pembangunan politik diambil oleh pemerintah sebagai lembaga politik yang efektif dalam alam Orde Baru. Hal ini tidak perlu diherankan karena Orde Baru berangkat dari situasi di mana pemerintah merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan yang efektif. Komitmen pemerintah terhadap demokrasi sudah terbukti dengan fakta bahwa tiap inisiatif politik pemerintah disalurkan melalui lembaga-lembaga politik lainnya seperti lembaga perwakilan kita, sesuai fungsi dan peranan yang dituntut oleh konsepsi yang hendak dijadikan landasan kebijakan. Akan tetapi adalah mustahil untuk mengharapkan adanya keputusan prinsipial di bidang politik yang dilancarkan tanpa adanya inisiatif pemerintah lebih dahulu. Walaupun secara keseluruhan peranan pemerintah ini positif, di masa lalu seperti diuraikan di muka terdapat gejala bahwa intervensi pemerintah di sana-sini masih bersifat disfungsional. Selama belum ada kemapanan fungsi, maka hal-hal yang disfungsional memang adakalanya dapat dibenarkan. Namun perlu diingat bahwa strategi politik Orde Baru itu sendiri pada gilirannya akan menumbuhkan fungsi serta peran yang makin lama makin menonjol dari lembaga-lembaga politik lainnya. Kehendak untuk menciptakan kerangka landasan pembangunan di segala bidang kehidupan merupakan indikasi dari arah yang kita tempuh. Hal ini disadari oleh pemerintah terbukti dari kurangnya intervensi yang disfungsional tadi. Jadi secara gradual, memang sudah terjadi pembaharuan dalam sikap politik kita. Namun kiranya masih perlu ditingkatkan konsistensi dari gejala ini, dengan langkah-langkah yang nyata untuk menciptakan peran, fungsi maupun bobot dari lembaga kekuasaan lainnya seperti lembaga perwakilan serta lembaga peradilan kita.

Prospek ke arah majunya peranan kelembagaan politik kita akan senantiasa cerah seiring dengan adanya komitmen yang teguh dari para penyelenggara negara untuk selalu mendekatkan diri pada cita-cita kemerdekaan bangsa. Cita-cita luhur ini hanya dapat ditempuh jika terwujud persamaan nasib dan

cita-cita pula dalam masyarakat luas, karena persamaan nasib dan cita-cita inilah yang telah membentuk negara bangsa Indonesia. Dengan demikian upaya-upaya politik di masa mendatang harus menempatkan perwujudan solidaritas sosial dalam perikehidupan kebangsaan kita. Perwujudan solidaritas sosial amat penting di masa-masa dekat ini karena proses pembangunan nasional kita mengalami tantangan-tantangan berat, antara lain disebabkan oleh adanya resesi dunia yang mempunyai dampak yang langsung merugikan pembangunan ekonomi kita yang merupakan titik berat pembangunan nasional. Penderitaan yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi yang memuncak hanya akan dapat ditanggung bebannya oleh semua pihak jika suasana solidaritas sosial dapat diciptakan. Sebaliknya jika terdapat perasaan maupun bukti yang meluas bahwa beban permasalahan ekonomi ditanggung secara tidak adil oleh sebagian masyarakat, sedangkan bagian masyarakat lain yang relatif lebih makmur seolah-olah tidak memikul beban yang sepadan, maka tidak dapat dipersalahkan jika terjadi pula kemerosotan disiplin sosial karena menipisnya solidaritas bangsa. Dalam suasana ini kecemburuan sosial amat mudah tercipta sehingga sekat-sekat pemisah bangsa yang telah dikikis habis dengan perjuangan politik yang demikian lama, dapat tumbuh kembali dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak mampu kita lihat perwujudannya dewasa ini. Kemungkinan ini harus dapat kita antisipasikan secara dini, supaya usaha-usaha untuk memerankan lembaga-lembaga politik kita dalam upaya mewujudkan solidaritas sosial ini dapat terus-menerus dilakukan.

Seperti telah diuraikan di atas, suasana politik dewasa ini amat menguntungkan karena, menurut istilah Nurcholis Madjid, dewasa ini terdapat gejala konvergensi nasional. Kecenderungan konvergensi nasional ini, jika dikaitkan dengan upaya-upaya pembentukan solidaritas sosial yang nyata akan memberikan makna yang amat berharga bagi kehidupan kebangsaan kita. Di lain pihak kecenderungan konvergensi nasional jika tidak mampu menciptakan solidaritas sosial, hanya akan memperkuat perasaan bahwa yang terjadi tidaklah lebih dari sekedar pemusatan dari berbagai hal, baik kekuasaan maupun sumber daya. Sukar untuk mengharapkan terwujudnya disiplin sosial dalam suasana semacam ini, dan dapat terbayang besarnya energi serta upaya yang harus dilakukan untuk memelihara konvergensi nasional jika perasaan-perasaan semacam itu dibiarkan meluas

Tantangan seperti dilukiskan di atas menggarisbawahi betapa besar seharusnya komitmen kita terhadap Pancasila dan UUD 1945, karena pengamalan Pancasila di masa mendatang tidak mustahil harus kita laksanakan dalam suasana yang jauh dari ideal, di mana akan terdapat kondisi-kondisi obyektif yang dapat memancing orang untuk memikirkan alternatif-alternatif lain. Kemungkinan dimasyarakatkannya alternatif lain tidak boleh diremehkan dalam abad modern ini karena kita tidak mempunyai

pilihan lain kecuali bersikap terbuka, yang berarti pula terbuka bagi gagasan-gagasan yang datang di tengah-tengah kita melalui berbagai cara. Ketertutupan bukanlah jawaban, karena ketertutupan terbukti telah merupakan eksperimen yang gagal, bahkan bagi negara-negara yang menganut ideologi yang tertutup. Karena komitmen terhadap Pancasila berarti pula komitmen terhadap demokrasi sesuai dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi yang demokratis, maka tugas pengamalan Pancasila harus juga kita laksanakan dengan semangat demokrasi tersebut. Hal ini berarti pula bahwa di masa mendatang ini, usaha yang lebih besar harus kita curahkan untuk mempertinggi derajat kemandirian masyarakat dalam pengamalan Pancasila, dan tidak hanya mengandalkan diri dari perkembangan badan-badan politik formal yang kita punyai. Dengan demikian masyarakat harus pula ditingkatkan peranannya sebagai asset nasional dalam pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN. Kesadaran ideologis masyarakat akan merupakan penangkal yang berharga bagi usaha-usaha untuk penyusupan ideologis pihak lain. Oleh karena itu maka suatu tinjauan mengenai peranan lembaga-lembaga masyarakat menjadi penting, karena tantangan-tantangan masa depan memerlukan penggerakan yang maksimal dari seluruh sumber daya kita. Kuatnya peranan lembaga masyarakat dapat merupakan sumbangan yang berharga terhadap prospek kelembagaan politik kita, karena walaupun lembaga masyarakat tidak mempunyai fungsi politik yang langsung, namun sebagai kumpulan manusia yang terorganisasi maka lembaga masyarakat merupakan bagian yang penting dari infrastruktur politik kita.

Dari segi politik, pentingnya pertumbuhan lembaga masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanapun juga, politik adalah seni untuk mewujudkan hal-hal yang mungkin. Baik-buruknya kemungkinan yang dapat kita pertimbangkan dalam banyak hal amat tergantung dari kemampuan kita bukan saja dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, namun juga dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditumbuhkan. Seringkali, terbatasnya kemungkinan yang ada hanya mampu menciptakan tindakan politik yang jika diukur semata-mata dari segi normatif, tidaklah memadai. Oleh karena itu jika kita menginginkan terciptanya kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, maka kita harus mampu menciptakan iklim yang lebih baik, agar kemungkinan yang dapat kita pertimbangkan di masa mendatang dapat secara normatif kita nilai lebih baik pula. Tumbuhnya swadaya masyarakat berperan dalam menciptakan kemungkinan yang normatif lebih baik itu, karena masyarakat yang mandiri serta berswadaya adalah tulang punggung kehidupan politik yang demokratis. Jika lembaga masyarakat yang tumbuh tersebut terdiri dari Pancasilais yang tangguh, maka prospek kelembagaan politik di masa depan senantiasa cerah, tidak semata-mata tergantung dari mutu kehidupan politik yang dewasa ini kita alami.

Ikhtisar Masalah Ekonomi

Hadi SOESASTRO

1. Prospek dan masalah kesinambungan perekonomian bangsa dan negara dapat, dan perlu, disoroti dari berbagai segi. Pengantar ini tidak mengambil pendekatan sektoral, yaitu yang membahas perkembangan dan masalah pertanian dan industri ataupun pengelolaan fiskal dan moneter, tetapi menggunakan pendekatan tematik.
2. Tema *pertama*, dan mungkin yang terutama, adalah masalah penciptaan lapangan kerja. Yang *kedua*, adalah prospek pertumbuhan ekonomi dalam era "pasca-minyak." Tema *ketiga*, yang bersifat normatif, adalah yang menyangkut cita-cita ideal mengenai sistem ekonomi Indonesia. *Keempat*, adalah peninjauan terhadap perkembangan ekonomi nasional sebagai bagian dari perkembangan nasional secara keseluruhan. Tema *kelima*, yang tidak kalah pentingnya, adalah perkembangan ekonomi Indonesia dilihat dalam perspektif -- dan tantangan -- perkembangan ekonomi global dan regional (Asia-Pasifik dan Asia Tenggara).
3. Dari berbagai tinjauan tematik ini kiranya akan tersimpulkan bahwa kesinambungan kehidupan ekonomi bangsa dan negara bukannya meminta *pengukuhan* institusi-institusi ekonomi yang ada melainkan menuntut *perubahan* institusional.
4. Masalah penciptaan lapangan kerja bukan merupakan masalah baru, dan bukan pula masalah sederhana untuk dipecahkan. Selama dasawarsa 1970-an tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tidak banyak mengalami perubahan (70% untuk laki-laki, 33% untuk wanita). Pemanfaatan tenaga kerja yang rendah (*underutilization*) tetap merupakan masalah. Secara absolut jumlah tenaga kerja di sektor pertanian *tidak* mengalami penurunan, walaupun saham sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja menurun dari sekitar 65% (1971) menjadi 56% (1980). Peningkatan

penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian lebih banyak terjadi di sektor tertier (jasa-jasa) daripada di sektor sekunder, baik di desa maupun di kota. Data BPS (1981) menunjukkan bahwa 70% dari mereka yang bekerja di Indonesia adalah berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau anggota keluarga, dan bekerja sebagai pekerja keluarga. Sebagian besar dari jumlah ini sebenarnya termasuk dalam apa yang dinamakan *sektor informal* (40% di kota-kota, 80% di pedesaan), yang -- *per definisi* -- tidak terjangkau oleh usaha-usaha *langsung* dan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Malahan bila terjangkau, seringkali akibatnya bukanlah penciptaan lapangan kerja melainkan eliminasinya. Hal ini disebabkan oleh karena keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan kehidupan ekonomi -- khususnya di tingkat lokal -- cenderung menciptakan *ekonomi jawatan*, di mana mekanisme birokrasi yang sangat tidak sempurna menggantikan mekanisme pasar dan sekaligus mematikan potensi swadaya masyarakat.

5. Ketidaktepatan mekanisme birokrasi ini segera terlihat dari pola alokasi dana dan distribusinya antara aparat Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan desa yang sangat timpang (105 : 15 : 6 : 1 pada tahun 1982) dan kecenderungan sentralisasi yang semakin besar (bandingkan dengan tahun 1975: 68 : 11 : 8 : 1). Dengan perkataan lain, usaha pemerintah untuk lebih luas menjangkau ke bawah tidak didampingi oleh perangkat administratif yang memadai, sedangkan tidak mungkin Pemerintah Pusat dapat mempunyai jangkauan kontrol yang efektif.
6. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama dasawarsa 1970-an merupakan sebab utama mengapa keadaan ketenagakerjaan tidak memburuk. Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor formal, yaitu yang secara efektif dijangkau pemerintah memang rendah, tetapi sektor informal, yang berkembang sebagai akibat pertumbuhan ekonomi, telah menjadi penyelamat. Untuk mengatasi masalah lapangan kerja di masa datang perlu kiranya dipermasalahkan kembali: oleh siapa, bagaimana, dan di mana (untuk siapa) diciptakan lapangan kerja. Masalahnya menjadi semakin rumit bila prospek pertumbuhan ekonomi tidak menggembarakan.
7. Prospek perekonomian Indonesia dalam era "pasca-minyak" tampaknya kurang menggembarakan. Hal ini mungkin berarti bahwa landasan dan kebijaksanaan makro-ekonomi perlu mengalami perubahan. Kebutuhan ("kehausan") ekonomi Indonesia akan devisa dengan intensitas seperti dalam dasawarsa 1970-an mungkin tetap dapat terpenuhi melalui usaha-usaha penggalakan ekspor non-migas secara sistematis dan terarah. Untuk itu sektor produksi (pertanian dan industri) perlu dibenahi, selain usaha menciptakan sistem perdagangan (luar negeri) yang mantap. Yang

jelas tidak dapat dipenuhi adalah "kehausan" pemerintah akan dana-dana untuk membiayai anggaran. Sebab, pajak dari minyak -- yang bagian terbesar merupakan penerimaan atas pemilikan sumber alam (*loyalty*) tidak bisa diganti oleh hasil pajak dari kegiatan produksi yang menghasilkan nilai ekspor yang sama. Artinya, strategi pembangunan yang bertumpu pada peranan dominan dari APBN (pola Pelita) tampaknya sulit dipertahankan.

8. Sejauh mana perubahan peranan ekonomi pemerintah dapat diterima oleh masyarakat atas pertimbangan normatif kiranya perlu pula dibahas. Sebenarnya perlu pula ditanyakan sejauh mana peran dominan pemerintah di waktu lalu telah dapat membina pengembangan sistem ekonomi yang didambakan oleh Orde Baru. Dalam Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, pasal 7, misalnya, dinyatakan bahwa dalam demokrasi ekonomi (yang dicita-citakan itu) tidak ada tempat bagi ciri-ciri negatif sebagai berikut: (a) sistem "free-fight-liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi ...; (b) sistem "etatisme" dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara berdominasi penuh dan yang mendesak serta mematikan potensi serta daya-kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara; (c) monopoli yang merugikan masyarakat.
9. Observasi yang menarik adalah bahwa di masyarakat ada perasaan bahwa ketiga ciri negatif tersebut kini semakin meluas di Indonesia. Pada saat bersamaan ada tuduhan bahwa di satu pihak sistem ekonomi nasional telah mengakibatkan yang kuat bertambah kuasa (seperti dalam sistem free-fight liberalism) dan di pihak lain sistem ekonomi nasional bertambah etatis, dan karena eksistensi kedua hal tersebut (yang sepintas tampaknya kontradiktif) timbullah monopoli-monopoli (publik dan privat) yang merugikan karena tidak ada kontrol masyarakat yang efektif.
10. Dominasi pemerintah di bidang ekonomi ini kiranya merupakan pencerminan dari dominasi peran pemerintah di semua bidang kehidupan. Sistem administrasi, birokrasi, dan mungkin pula sistem politik, yang dibangun kembali sejak Orde Baru, untuk menjamin terciptanya stabilitas politik demi terselenggaranya pembangunan ekonomi, tampaknya menjurus kepada pemantapan *status-quo* demi *status-quo*. Ada kemungkinan usaha-usaha untuk mengubah peran ekonomi pemerintah akan menghadapi tentangan yang kuat. Padahal, perubahan peran ini *tidak* harus berarti pengurangan peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Di mana-mana dibutuhkan intervensi pemerintah, tidak hanya untuk mengoreksi "kegagalan alokasi pasar" tetapi juga untuk mensponsori pembangunan (industrialisasi). Namun, "kegagalan alokasi non-pasar" itu kiranya diakibatkan oleh fungsi pemerintah yang terlampau dititikberatkan pada fungsi mengatur (*regulatory function*). Yang perlu dibina adalah fungsi

pembangunan (*developmental function*) dari pemerintah. Perubahan orientasi ini, antara lain, akan menghasilkan "hubungan penguasa-pengusaha" yang berbeda.

Deregulasi dalam ekonomi bisa berjalan seiring dengan pengembangan fungsi pembangunan pemerintah. Pola pembangunan yang bersifat "*government-sponsored, private sector-led*" ini tampaknya menjadi tuntutan khususnya bagi negara-negara Asia-Pasifik melihat kecenderungan dan tantangan perkembangan ekonomi dunia dan ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara berkembang seperti RRC dan India, dengan pasar domestik yang luas itu, kiranya menyadari keadaan ini dan berusaha menemukan pola baru tersebut. Mau tidak mau, kenyataan ini perlu ditanggapi secara serius oleh Indonesia. Bila tidak, ada bahaya bahwa di kemudian hari ekonomi Indonesia akan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara sekelilingnya. Pola pembangunan di atas jelas menuntut sektor swasta yang tangguh, yang hingga kini sebenarnya juga belum ada di Indonesia.

Dalam Masa Pasca-Minyak Hendaknya Dipikirkan Konsep "Full Services" Banking*

J. PANGLAYKIM

PENGANTAR

Industri perbankan di negara-negara seperti Amerika, Inggris, Jepang dan bahkan negara-negara Asia seperti Malaysia, sedang mengalami perkembangan yang disebut deregulasi atau liberalisasi. Menurut pengamatan kami, deregulasi yang sedang dalam proses pelaksanaannya itu, merupakan pencerminan perubahan-perubahan yang dapat dilihat oleh masyarakat perbankan dan bisnis. Perbankan internasional dilihat sebagai pendorong ke arah ekonomi dunia yang terintegrasi.

Sebelum kita membahas aspek dan dampak deregulasi tersebut kami akan mengemukakan perkembangan yang sedang terjadi di dunia bisnis internasional dan dampaknya pada industri perbankan.

BISNIS DAN PROSES PERUBAHAN

Dewasa ini, kita dapat melihat perubahan yang sedang terjadi dalam dunia bisnis dan usaha-usaha lain. Dalam karangan singkat ini kami akan berusaha mengajukan beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai penyebab perubahan-perubahan tersebut.

Bisnis di negara-negara yang mengambil strategi perkembangan ekonomi melalui permintaan dalam negeri (*domestic demand-led-growth strategy*), sedang menghadapi pasar dalam negeri yang telah mencapai titik jenuh. Kejenuhan pasar dalam negeri juga dialami oleh negara-negara yang menerapkan

kan strategi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor (*export-led-growth strategy*). Karena pasar dalam negeri mereka sedang jenuh, mereka mencari pasar-pasar di luar negeri. Untuk itu mereka harus mengadakan perubahan manajemen, personalia dan penciptaan jaringan internasional seperti yang telah dimiliki Sogo Shosha dan Chaebol misalnya. Ini berarti mereka harus memperbesar/mengekspansikan usahanya di tingkat internasional. Di tingkat nasional kita melihat beberapa pengusaha telah melakukan diversifikasi usahanya. Di antara usaha-usaha itu ada yang misalnya, mendirikan pabrik tekstil, kayu lapis, poliester, baja, komponen sepeda motor, hotel, gedung perkantoran, yang tentu saja memakan biaya yang tidak kecil.

PEMBIAYAAN

Karena ukuran usaha membesar dan diversifikasi maka perusahaan membutuhkan berbagai bentuk dana dan pemanfaatannya. Beberapa waktu yang lalu, secara tradisional, sebuah perusahaan akan menghubungi bank untuk memperoleh pinjaman modal kerja dan/atau *investment bank* untuk keperluan investasi, atau perusahaan sekuriti untuk keperluan penjualan saham ke masyarakat. Tetapi dewasa ini, tampak sudah demikian banyak perusahaan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, yang bertindak sebagai "bank tidak resmi." Dewasa ini, perusahaan-perusahaan besar telah memiliki semacam bagian keuangan atau *bank intern* yang dapat mengeluarkan dana-dana yang terkonsentrasi untuk keperluan perluasan/diversifikasi usaha.

Selain itu, perusahaan-perusahaan besar kini dapat menarik modal langsung dari pasar uang dan modal nasional dan internasional melalui berbagai "alat" keuangan seperti surat hutang (bond), promissory note (promnote), commercial papers, pinjaman sindikasi misalnya. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar Jepang (Sogo Shosha), beberapa waktu yang lalu, masih sangat tergantung kepada bank mereka (misalnya Marubeni kepada Fuji Bank, Daiichi Kangyo kepada Daiichi Kangyo Bank). Bank-bank tersebut memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar kepada perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka tidak langsung membiayai perusahaan-perusahaan menengah dan kecil tetapi melalui Sogo Shosha. Ini disebabkan bank-bank Jepang waktu itu, belum mempunyai cukup dana dan pengalaman untuk membiayai dan menghadapi ribuan usaha menengah dan kecil itu. Kredit yang diberikan oleh Sogo Shosha bervariasi dari berbentuk bahan mentah sampai modal kerja. Ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh "big ten" perusahaan-perusahaan Belanda pada jaman kolonial. Bank-bank besar Belanda, waktu itu, tidak memberikan kredit langsung kepada usaha-usaha menengah dan kecil di Indonesia, tetapi melalui "big ten." "Big ten" inilah yang bertanggung jawab sebagai penyalur.

Dilihat dari sudut perbankan, kerjasama seperti ini masih sederhana, tidak membutuhkan aparat dan jaringan yang luas. Sebaliknya, "big ten"-lah yang harus mempunyai aparat dan jaringan yang terbesar di pelosok Indonesia. Mereka harus memiliki *verkopers* (tenaga-tenaga penjual) yang setiap hari harus berhubungan dengan ribuan pengusaha (grosir dan eceran) untuk mengecek apakah pesanan tidak melebihi kemampuan pengusaha-pengusaha tersebut, menagih pembayaran yang sudah jatuh tempo, dan sebagainya. Dalam hal ini, Chaebol (general trading firm Korea Selatan) tampak baru akhir-akhir ini saja dapat menggunakan pembiayaan dari Export-Import Bank karena mereka menyadari bahwa tanpa pembiayaan yang kuat, mereka tidak akan mungkin dapat bersaing di pasar internasional. Perusahaan-perusahaan dagang Jerman Barat dan Perancis misalnya, menggunakan sistem kerjasama dengan bank-bank mereka. Bank-bank tersebut langsung membiayai transaksi-transaksi. Untuk transaksi sebesar, katakan, US\$10 juta, pembeli diminta memberikan uang muka sebanyak 10% atau 20% misalnya, sisanya dibiayai oleh bank.

Dewasa ini, para Sogo Shosha sudah sangat kuat di bidang finansial. Mereka tidak lagi bergantung kepada satu atau dua bank, tetapi mereka telah menjalin hubungan dengan ratusan bank internasional. Mereka dapat pula menarik modal langsung dari pasar uang dan modal internasional, atau mengeluarkan bonds, commercial papers, pinjaman sindikasi. Dengan demikian kemampuan dan kesanggupan mereka memberikan pinjaman sangat meningkat. Tidak mengherankan bila mereka dapat membiayai proyek-proyek besar yang tersebar di pelosok dunia, atau bila mereka dapat mengekspos pinjaman kepada kelompok usaha di Indonesia minimal US\$1 milyar. Secara keseluruhan kemampuan mereka mengelola dana dapat dikatakan luar biasa dan fantastis. Salah satu dari "big nine Sogo Shosha" misalnya, mampu memberikan pinjaman sampai puluhan milyar dollar. Ini berarti dengan nama baik, organisasi/manajemen yang rapi, dan kesempatan bisnis yang dipergunakannya dengan sebaik-baiknya, mereka dapat memanfaatkan dana internasional secara global. Dengan kata lain, mereka, Sogo Shosha, juga merupakan bank karena mereka telah mampu menjadikan uang dan modal sebagai komoditi baru!

SURPLUS NERACA PERDAGANGAN

Surplus neraca perdagangan Jepang atas Amerika dan negara-negara MEE, dalam realita, merupakan hasil ekspor Jepang ke dunia internasional. Dalam kenyataan, dollar dalam jumlah milyaran berada dalam penguasaan perusahaan-perusahaan Jepang, Mitsui, Marubeni, Mitsubishi, Toyota, Bridgestone, Nissan, dan Hitachi misalnya. Ini berarti bahwa Jepang telah dapat digolongkan sebagai pengeksport modal yang selalu dikaitkan dengan

penanaman proyek investasi, atau penanaman dalam US government treasury bonds, atau membeli ekuiti perusahaan di Amerika. Dewasa ini telah timbul semacam kekhawatiran di Amerika bahwa Jepang akan menjadi pemilik demikian banyak perusahaan di negara tersebut dan menjual kembali produk-produknya sebagai produk *made in America*. Seperti diketahui, surplus perdagangan yang diperkirakan akan terus meningkat, telah diarahkan oleh investor-investor Jepang ke proyek-proyek berteknologi tinggi di negara-negara industri. Jepang mengatakan bahwa surplus tersebut dimanfaatkan kembali karena ditanam di proyek secara internasional.

KE ARAH INDUSTRI BERTEKNOLOGI TINGGI

Penanaman modal dalam industri-industri berteknologi tinggi merupakan faktor penyebab lain terjadinya perubahan dalam dunia bisnis (perusahaan-perusahaan dagang besar Jepang seperti Mitsui, mulai mengalihkan perhatian ke industri-industri berteknologi tinggi). Dalam usaha mendirikan industri-industri tersebut di luar negeri, negara yang mempunyai sarana yang paling memungkinkan untuk pendirian tersebut tampaknya ialah Amerika.

Investasi itu sendiri jelas memerlukan modal yang besar. Menurut perhitungan, investasi dalam industri-industri berteknologi tinggi di Amerika akan terus meningkat. Investasi juga dilakukan dalam industri jasa-jasa seperti penguasaan bank-bank oleh lembaga-lembaga keuangan Jepang.

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN AMERIKA

Perusahaan-perusahaan besar di Amerika, seperti telah diketahui, telah dapat menarik modal langsung dari masyarakat dan tidak lagi terlalu bergantung kepada bank-bank walaupun mereka masih menggunakannya. Hal ini telah dilakukan oleh IBM, Sears & Roebuck misalnya. Mereka mengeluarkan surat-surat berharga dan menjualnya kepada masyarakat. Sears & Roebuck misalnya memiliki *financial supermarket* sendiri dengan puluhan ribu langganan yang dapat mengorganisasikan diri dalam supermarket tersebut. Dewasa ini, mereka bahkan telah dapat bersaing dalam penarikan dana dari masyarakat.

LALU-LINTAS BEBAS

Dengan meluasnya lalu-lintas pasar uang dan modal internasional, mobilitas antara negara-negara dan pusat-pusat keuangan pun turut berkembang

ke arah kecanggihan. Para pemegang uang dalam perusahaan-perusahaan, pada gilirannya, mulai memiliki keahlian mengenai perbankan dan pasar keuangan sehingga sistem pembiayaan perbankan yang masih tradisional mau tidak mau mengalami perubahan besar khususnya sistem pembiayaan di negara-negara industri dan beberapa negara sedang berkembang. Dengan adanya komunikasi yang mudah antara pusat-pusat keuangan dan langganan-langganan, dan kemudahan-kemudahan lain seperti jaringan informasi dengan sistem komputer, maka dapat diperkirakan bahwa dunia keuangan internasional dan nasional dalam tahun-tahun mendatang akan mengalami perubahan pula. Teknologi yang canggih seperti telematik kurang lebih akan mempersatukan negara-negara dalam suatu "global system."

MENGURANGI KETERGANTUNGAN KEPADA DUNIA PERBANKAN?

Untuk sementara kita dapat menarik kesimpulan bahwa dunia usaha nasional dan internasional (khususnya negara-negara industri) telah memiliki kemampuan sendiri untuk menarik uang dan modal dari pasar nasional dan internasional. Dengan demikian ketergantungan mereka kepada sektor perbankan mulai berkurang dan, pada gilirannya, hubungan mereka dengan sektor perbankan pun mengalami perubahan yang tidak kecil. Deregulasi sistem perbankan antara lain menyebabkan liberalisasi berbagai peraturan mengenai penempatan modal. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh perbankan di Amerika dan Inggris itu, dapat dikatakan mempunyai sifat-sifat seperti yang terlihat dalam "the unregulated Euromarkets," yakni pasar yang seolah-olah tidak bernasionalitas. Ini berarti bank-bank komersial, bank-bank investasi, dan bank-bank lain, serta perusahaan/industri, saling bersaing untuk memperoleh dana masyarakat khususnya dana perusahaan-perusahaan asuransi, yayasan, pensiun misalnya.

DEREGULASI SISTEM PERBANKAN: BEBERAPA CATATAN

Menurut pandangan kami, akibat perubahan dalam dunia usaha dan industri tersebut bukan saja membutuhkan pembiayaan yang terus meningkat, juga diperlukan bentuk-bentuk pembiayaan baru. Sektor perbankan, bagaimanapun besarnya, tampak tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan sebagai akibat perkembangan pesat dunia usaha nasional dan internasional itu. Perusahaan-perusahaan besar seperti Marubeni, IBM, General Motors misalnya, tidak lagi dapat mengandalkan diri kepada beberapa bank saja karena bank-bank tersebut, dibatasi oleh peraturan, tidak dapat memberikan kredit sejumlah yang diperlukan oleh usaha/industri. Keterbatasan kemampuan memberikan kredit sektor perbankan itu lebih terasa sejak dihapuskan-

nya nilai tukar tetap (fixed exchange rate) dan diberlakukannya nilai tukar mengambang (floating exchange rate). Keadaan ini memaksa sektor usaha/industri memupuk keahlian sendiri dalam pengolahan valuta asing dan seluk-beluk perbankan. Pada gilirannya ini mengakibatkan manajer-manajer baru yang dicari/ditarik dari sektor perbankan, harus menyiapkan diri menghadapi tugas baru sebagai ahli dalam bidang perbankan dan dalam bidang mata uang luar negeri di dalam lingkungan perusahaan. Ini berarti bahwa mereka harus lebih canggih dalam bidang keuangan/pembiayaan. Dengan adanya perubahan yang mendalam pada perusahaan-perusahaan nasional dan internasional maka para bankir mulai mendesak diadakannya deregulasi sistem perbankan. Deregulasi itu dimaksudkan untuk mengurangi peraturan-peraturan mengenai penarikan dan penempatan modal dan uang dalam sektor perbankan dan mengenai perbedaan antara bank-bank komersial, investasi, perusahaan-perusahaan sekuriti misalnya. Sebagai contoh di Jepang dewasa ini terdapat dua kekuatan yang ingin menghapuskan batas-batas usaha antara bank-bank komersial (*city banks*) dan perusahaan-perusahaan sekuriti (Nomura, Nikko, misalnya), sehingga bank-bank komersial dapat melakukan usaha-usaha perusahaan sekuriti dan sebaliknya. Dewasa ini Yen sudah mulai memperlihatkan kecenderungan ke arah menjadi suatu mata pembayaran internasional.

Dewasa ini, Amerika Serikat tampak telah mengarah ke proses perubahan usaha perbankan. Bank-bank seperti Citicorp misalnya, yang beberapa waktu yang lalu tidak dapat beroperasi di negara bagian lain di Amerika, kini telah bergerak dengan membeli bank-bank di negara-negara bagian lain. Mereka telah mengadakan merger atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sekuriti bukan saja di Amerika Serikat, juga di London, Singapura, dan Hongkong misalnya. Citicorp dapat digolongkan sebagai "global bank." Dengan demikian telah timbul kelompok usaha baru. Kelompok usaha baru ini, untuk melakukan "pencaplokan" usaha-usaha kecil, jelas memerlukan modal yang tidak kecil. "Merchant banks" seperti Kleinwort Benson, Hil Samuel Group, S.G. Warburg di Inggris yang beberapa waktu yang lalu hanya memerlukan modal yang tidak terlalu besar, kini untuk melakukan "placing" harus memperbesar kekuatan modalnya karena perusahaan yang dibeli oleh bank-bank besar Amerika Serikat, memperoleh injeksi modal yang besar. Ini dibuktikan oleh Rule 415 US SEC pada bulan April 1982. Dengan adanya peraturan tersebut, sebuah perusahaan dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu pengeluaran bonds atau saham-saham tanpa bantuan penjamin dan menempatkannya untuk jangka waktu dua tahun.¹ Dalam kaitan tersebut perusahaan-perusahaan besar seperti Solomon Brothers, First Boston, Goldman Sachs, tampak dapat menarik manfaat.

¹*The Economist*, 16 Maret 1985.

Selain bank-bank komersial dan investasi (commercial & investment banks), usaha-usaha besar seperti Sears & Roebuck, dengan volume penjualan US\$30,8 milyar, juga telah membuka lembaga keuangan yang tergolong financial supermarket. Dengan puluhan ribu langganan, mereka mempunyai basis yang cukup kuat sebagai lembaga keuangan yang bergiat sebagai financial supermarket. Mereka yang memerlukan uang dan yang ingin menyimpan uang dapat melakukannya melalui Sears & Roebuck. Sebetulnya supermarket di negara kita dapat dikatakan telah melakukan fungsinya karena mempunyai kedudukan yang unik. Para penyalir, yang dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan itu, telah membiayai mereka dengan bertindak sebagai *retail outlet* dengan memberikan pinjaman berjangka waktu 1 sampai 2 bulan bergantung kepada jenis produk, apakah *fast* atau *slow moving*. Kue-kue basah misalnya, termasuk ke dalam golongan produk *fast moving* karena produk ini menyangkut pengusaha kecil, sehingga "financial settlement" dilakukan dengan cepat.

PERBANKAN, KE ARAH "FULL SERVICES" BANKING? (BANK YANG DAPAT MENYEDIKAN JASA-JASA YANG LENGKAP)

Dengan adanya perkembangan sektor perbankan sebagai akibat berbagai peraturan (deregulasi, liberalisasi, atau yang bersifat mengurangi campur tangan langsung petugas pemerintah dalam sektor tersebut), maka timbulnya kelompok-kelompok baru merupakan tanda bahwa sektor perbankan sedang mengarah ke "full services banking" atau pemberian jasa-jasa yang lengkap.

Bank-bank dengan pengelompokan barunya dapat memberikan jasa-jasa bank komersial, atau dapat bertindak sebagai bank investasi, bukan saja dalam hal pencarian modal, juga dalam bentuk nasihat atau paket (bank komersial gaya lama dan baru), memberi bantuan dalam perdagangan imbal-beli (counter-trade) dengan negara-negara yang mendasarkan perdagangannya pada sistem perdagangan tersebut, memberi nasihat dalam bidang asuransi, membiayai dalam bidang energi, perkebunan, agribisnis, dan sebagainya. Mereka tidak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan antara bank-bank komersial, investasi, dan perusahaan-perusahaan sekuriti. Dewasa ini kombinasi bank komersial/investasi/sekuriti dan "brokerage" sudah mulai muncul.

Tetapi masalah yang kita hadapi jauh lebih sulit, yakni perbedaan antara bank devisa dan bank non-devisa, lembaga keuangan non-bank. Perbedaan tersebut dalam keadaan bisnis dan industri dan dunia keuangan yang sedang dalam proses perubahan itu, sebenarnya kurang relevan lagi, bahkan dapat dilihat sebagai kendala. Oleh karena itu menurut kami, tekanan-tekanan ke

arah penerapan deregulasi sistem perbankan, mempunyai alasan-alasan yang menarik.

PERBANKAN DI ASEAN: BEBERAPA CATATAN SINGKAT

Singapura

MAS, akhir-akhir ini, tampak mengatur perkembangan perekonomian Singapura sebagai pusat keuangan dengan cukup ketat. Dari perkembangan kelompok-kelompok usaha seperti OCBC, UOB (baru saja membuka perwakilan di Jakarta), OUB, DBS misalnya, kita dapat melihat perkembangan sistem perbankan di negara tersebut. Perbedaan antara bank devisa dan bank non-devisa tidak tampak lagi. Hal ini disebabkan bank-bank di Singapura minimal dapat digolongkan sebagai bank regional dan bahkan beberapa di antara mereka telah bergiat di tingkat internasional. Sementara itu, persaingan di dalam negeri pun cukup ketat.

Akhir-akhir ini, banyak perusahaan terkenal mengalami kesulitan keuangan, bahkan di antara mereka ada yang telah bangkrut. Oleh karena itu, bank-bank telah meminta tambahan jaminan.

Deregulasi sistem perbankan di Singapura tampak belum menghilangkan perbedaan antara bank komersial, merchant bank, dan lembaga keuangan (finance companies). Kegiatan mereka masih ditentukan oleh MAS dan belum mengalami liberalisasi. Tetapi di dalam pasar uang dan modal Singapura tersedia cukup banyak "alat" keuangan. Usaha mereka pada tingkat *off-shore* cukup berkembang, terbukti dari puluhan bank asing dan bank nasional Singapura bergiat dalam pemberian pembiayaan off-shore. Pasar off-shore terbesar mereka ialah Indonesia. Jumlah total asset/liabilities Asian Dollar Unit dalam tahun 1984 adalah sebesar \$128 milyar.

Dunia perbankan yang modern dan beroperasi secara canggih dapat dikatakan sebagai bagian dari dunia perbankan modern. Terlihat pula para pemimpin yang relatif muda yang mengelola/menangani bank-bank di Singapura. Mereka memimpin bank-bank tersebut setelah memperoleh latihan, pendidikan, pengalaman setelah bekerjasama dengan bank-bank asing. Penguasaan bahasa Inggris tampak sangat membantu mereka dalam pencarian posisi dalam perbankan internasional. Tetapi keberhasilan para bankir dan pemimpin-pemimpin instansi dapat mengarah ke suatu tipe arogansi (kecongkakan). Setidaknya demikian menurut pandangan para bankir luar negeri yang berkesempatan berhubungan dengan mereka. Dan masalah kecongkakan dan kompleks ini memang sulit diterka karena hal itu dapat dikatakan sebagai

suatu "kebiasaan" (baca: kelemahan!) manusia yang telah berhasil. Keduanya sering mengakibatkan perubahan perilaku manusia. Arogansi tersebut tampaknya menjadi salah satu kelemahan mereka yang berhasil di bidang keuangan internasional di antara mereka yang disertai tugas memimpin dan mengatur pada tingkat resmi di Singapura misalnya.

Sektor usaha di Singapura, dengan usaha "off-shore"-nya, tampak telah memperoleh pelayanan yang cukup baik dengan tersedianya berbagai "alat" keuangan. Pada gilirannya, sektor ini dapat menyediakan berbagai bentuk kredit baik bank-bank nasionalnya maupun lembaga-lembaga keuangan luar negeri.

Malaysia

Dengan ditunjuknya menteri keuangan dari sektor swasta, yakni seorang pengusaha yang tergolong berhasil dan seorang akuntan senior pada salah satu perusahaan asing sebagai Gubernur Bank Sentral, tampak dunia perbankan Malaysia sedang mengalami berbagai perubahan. Mereka, secara bertahap, mengarah ke "full services banking" dan deregulasi sistem perbankan yang telah dimulai di negara-negara industri. Dunia perbankan di negara ini dengan ikut sertanya perusahaan-perusahaan milik negara dalam penguasaan dana misalnya, dapat dikatakan didominasi oleh bank-bank milik negara; misalnya Malayan Banking, United Malayan Banking Corporation, Bumiputera Berhad. Bank-bank luar negeri tampak diperkenankan ikut serta dalam kepemilikan perbankan di Malaysia.

Dewasa ini, mereka sedang memikirkan cara-cara menghilangkan kendala-kendala yang ada dan masih memisahkan lapangan kerja lembaga-lembaga keuangan.

Thailand

Thailand tampak telah berhasil mengatasi berbagai kesulitan likuiditas dan manipulasi yang dialami oleh lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. Thailand juga telah memiliki gubernur bank sentral baru. Peraturan yang mengharuskan bank dimiliki oleh ratusan pemegang saham (go public) tampak sudah diterapkan di negara tersebut. Bank-bank swasta seperti Bangkok Bank misalnya tampak masih mendominasi sektor perbankan di sana. Sampai saat ini Pemerintah Thailand baru dua kali mendevaluasikan nilai Baht-nya. Seseorang dari sektor swasta telah ditarik ke dalam lingkungan pemerintah untuk mendampingi perdana menteri dalam penelaahan dan penilaian peranan sektor swasta dalam pembangunan perekonomian negara tersebut.

Bank-bank swasta pun, akhir-akhir ini, banyak menarik tenaga-tenaga yang pernah menjadi teknokrat di berbagai departemen, khususnya dari lingkungan bank sentral, karena mereka memperoleh pendidikan yang cukup tinggi dan tergolong tenaga-tenaga yang dapat diandalkan. Peran bank-bank swasta di Thailand adalah cukup besar dan mereka yang menjadi pendorong berhasilnya sektor swasta dalam turut serta dalam program pembangunan ekonomi Thailand. Pemerintahnya berusaha menciptakan lingkungan yang meng-gairahkan. Thailand sudah memulai "Thailand Trust."

Pilipina

Memburuknya perekonomian dan timbulnya masalah-masalah lalu-lintas devisa telah menyebabkan bank-bank di Pilipina, dewasa ini, praktis terisolasi dari dunia perbankan internasional. Mereka lebih banyak bergiat di tingkat nasional. Banyak bank di luar Pilipina telah meminjamkan dana kepada bank-bank Pilipina atau mendepositokan dananya pada Citicorp cabang Manila, tetapi dengan adanya *moratorium* dalam pembayaran kembali maka banyak dari mereka yang mengalami kesulitan/kemacetan dalam penarikan kembali dana mereka. Salah satu lembaga keuangan yang cukup dikenal di ASEAN, PICA terpaksa menjual sebagian sahamnya kepada Elder, suatu kelompok usaha dari Australia. Hal itu disebabkan PICA tidak dapat menarik kembali piutangnya sebesar US\$70 juta di Pilipina.

Kita belum mengetahui banyak mengenai perkembangan perbankan di Pilipina. Yang pasti sebelum timbulnya kesulitan yang dihadapi oleh bank-bank pemerintah, sektor swasta mempercayakan penanganan dana mereka (deposito) kepada bank-bank swasta. Waktu itu pemerintah tampak berusaha menciptakan semacam universal banking, tetapi dewasa ini usaha ke arah itu tampak mengalami penangguhan. Perundingan-perundingan pemerintah Pilipina dengan IMF serta dengan bank-bank internasional masih berlangsung.

Indonesia

Seperti diketahui perbankan di Indonesia masih didominasi oleh bank-bank negara/pemerintah. Bank-bank swasta devisa dan non-devisa masih tertinggal jauh dari bank-bank negara/pemerintah dalam hal kemampuan dan kapasitas. Namun demikian bank-bank swasta devisa dan non-devisa masih merupakan sumber pembiayaan/pemberi kredit bagi sektor perdagangan. Saham mereka di bidang investasi masih tertinggal jauh. Hal ini disebabkan oleh *deposit base* mereka yang masih labil. Deposit base perbankan swasta masih bersifat jangka pendek (satu tahun) karena sebagian besar depositor

belum bersedia menyimpan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Selama tidak terdengar isu-isu mengenai rupiah, maka sektor perbankan kita dapat berusaha dengan tenang, tetapi bila terbetik isu di bidang moneter, dengan cepat isu itu dapat mengguncangkan bank-bank swasta, termasuk merepotkan bank sentral.

Hendaknya sektor perbankan swasta memikirkan usaha-usaha pencarian bentuk-bentuk deposito yang dapat menjadikan dasar perbankan lebih kuat. Misalnya membuat semacam kebijaksanaan yang membebaskan depositor yang mendepositokan dananya untuk jangka waktu, katakan, dua atau tiga tahun, dari pajak, atau dengan kata lain "memutihkan" modalnya. Dengan jalan itu mungkin deposit base sektor perbankan swasta akan lebih kuat/mantap. Atau bank-bank dapat pula mengeluarkan semacam surat utang jangka waktu sampai dengan lima tahun. Bank Duta Ekonomi sudah memulai mengambil dana bersifat jangka panjang.

Dewasa ini, sektor perbankan masih menghadapi kendala-kendala yang dilihat sebagai menghambat perkembangannya ke arah tipe "full services banking." Di pihak lain, sektor industri/usaha kita telah dapat memanfaatkan kredibilitas mereka untuk menarik modal dari pasar uang dan modal internasional, setelah menggunakan secara maksimal apa yang dapat disediakan oleh bank-bank negara. Sebagian besar dari sektor usaha/industri tersebut yang dapat digolongkan besar dan *diversified*, namun demikian masih dikuasai oleh keluarga atau kelompok keluarga, dan mereka juga merupakan pemegang saham terbesar bank-bank swasta non-devisa dan devisa. Bahkan ada sebuah surat kabar yang sudah terjun ke bidang perbankan. Kelompok-kelompok usaha tersebut telah melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar dari lembaga-lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri (ratusan milyar rupiah atau milyaran dollar).

Deregulasi sistem perbankan dewasa ini masih terbatas pada pembahasan bank-bank pemerintah untuk menentukan tingkat bunga deposito. Tetapi dengan adanya deregulasi itu, pengawasan terhadap pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri misalnya, tampak lebih ketat (intensif) sehingga bila terjadi kesalahan/penyelewengan, dapat segera diketahui. Bila kita membandingkan perkembangan sektor perbankan di Jepang dan Amerika Serikat misalnya, terutama dalam hal deregulasi yang telah dan sedang dijalankan di dua negara tersebut, maka sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa deregulasi tersebut dapat dijalankan dengan sepenuhnya di Indonesia. Dalam 25 tahun mendatang, sektor perbankan nasional bukan saja harus memiliki jaringan usaha dan informasi internasional (catatan: dewasa ini usaha ke arah tersebut mulai dirintis, misalnya oleh BNI '46), juga harus menjadi industri pertumbuhan (*growth industry*) yang dapat membawa mereka ke arah full services

banking. Semua itu, menurut kami, sangat berkaitan erat dengan perkembangan sarana bisnis (*business infrastructure*). Jadi bila kita ingin berhasil mendukung pelaksanaan ekspor non-migas yang dalam 25 tahun mendatang bertarget, katakan, US\$30 milyar, maka kita harus melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor perbankan nasional (swasta devisa dan non-devisa), lembaga keuangan non-bank misalnya dari sudut perspektif lain. Pada waktu itu, pembatasan bidang usaha mungkin dapat dilihat sebagai kendala yang tidak perlu. Mungkin juga sikap kita akan sangat berbeda dari sikap kita sekarang. Semua organisasi yang dapat mengembangkan diri dalam rangka mendukung usaha-usaha mempertahankan bangsa, harus dapat dimanfaatkan, karena bila tidak maka ini dapat dianggap sebagai suatu penghamburan asset negara atau usaha-usaha anasional. Dari sejarah bisnis kita telah mengetahui bahwa negara-negara yang mengambil strategi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, menyadari betapa pentingnya peranan yang harus dimainkan oleh sektor perbankan. Menurut pendapat kami, peranan tersebut tidak dapat "ditawar-tawar," bila kita ingin berhasil melaksanakan strategi ekspor apalagi mempertimbangkan bahwa penghasilan devisa dari minyak dalam 20 sampai 25 tahun mendatang akan sangat turun, bahkan mungkin zero! Dunia perbankan internasional dalam proses bisnis internasional dewasa ini dilihat sebagai akselerator ke arah menciptakan dan mewujudkan global economy.

IKHTISAR

Dalam karangan singkat ini, kami ingin mengajukan pendapat bahwa sektor usaha/industri misalnya, dilihat dari sudut bisnis internasional sedang mengalami berbagai perubahan pokok. Perubahan tersebut antara lain berbentuk pembesaran ukuran usaha (*diversified*) dan, kadang-kadang, terintegrasi secara vertikal (seperti perusahaan/kelompok usaha di Jepang). Dengan membesarnya usaha mereka, mereka harus memiliki keahlian sendiri di dalam lingkungan bank, misalnya, khususnya dalam pencarian dan penempatan dana. Kebutuhan mereka akan dana, dengan sendirinya, menjadi sangat besar. Ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok usaha besar seperti Sogo Shosha misalnya. Mereka telah mampu menarik dana dari pasar uang dan modal internasional dan mempunyai hubungan dengan ratusan bank nasional dan internasional. Demikian pula perusahaan-perusahaan besar Amerika. Para direktur mereka kini memiliki staf ahli di bidang perbankan dan keuangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan besar di mana mereka tidak lagi terlalu bergantung kepada sektor perbankan komersial dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Para depositor kini mulai pandai (*sophisticated*). Melihat perkembangan dunia usaha yang semakin interdependen dalam hal pembiayaan, maka per-

bankan dan lembaga keuangan Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang misalnya, yang masih terkotak-kotak dalam bank komersial, bank investasi misalnya, mulai mengadakan langkah-langkah deregulasi yang pada dasarnya berarti menghilangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengekang pengambilan dan penempatan dana. Perlu dicatat di sini bahwa di samping sektor pembiayaan, di beberapa negara terlihat adanya surplus modal. Jepang khususnya, kini dapat digolongkan sebagai pengeksport modal dan investor besar. Mereka telah me-recycle kembali surplus dollar ke dalam investasi internasional. Mereka umumnya menanam modal dalam industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi. Alasan lain yang menyebabkan mereka dapat mengurangi ketergantungannya kepada sektor perbankan ialah perkembangan dan mobilitas cepat lalu-lintas devisa bebas, komunikasi yang cepat dan adanya pusat-pusat keuangan yang telah berkembang. Mereka telah menerapkan bahwa comparative advantage adalah buatan manusia (man-made).

Perubahan yang sedang berlangsung dalam dunia usaha/industri dalam rangka memperoleh dana, menyebabkan sektor perbankan harus mengarahkan diri ke full services banking, yang berarti harus dapat memberikan jasa-jasa yang lengkap. Mereka harus mampu menciptakan kelompok-kelompok baru yang dapat menyediakan jasa-jasa yang selengkap mungkin mulai dari nasihat/petunjuk (seperti fungsi bank komersial dan investasi) sampai pada pemberian jalan untuk menarik modal (seperti fungsi perusahaan sekuriti), membantu perdagangan imbal-beli misalnya. Mereka juga harus mampu bertindak agresif dan mencari inovasi-inovasi, walaupun inovasi tersebut dengan cepat dapat ditiru oleh bank lain.

Di antara negara-negara anggota ASEAN, dapat dikatakan bahwa Singapura, Malaysia, dan mungkin Thailand telah mempersiapkan diri ke arah tipe "full services banking" dengan jalan menciptakan kelompok-kelompok baru seperti OCBC, DBS, United Malayan Banking, Bangkok Bank disertai dengan usaha-usaha pelengkapannya. Filipina juga pernah memikirkan untuk menerapkan konsep "full services banking," tetapi kesulitan-kesulitan ekonomi nasional, tampak belum memungkinkan mereka -- bank-bank nasional -- menerapkan konsep tersebut.

Indonesia, mau atau tidak mau, juga harus menyiapkan diri ke arah "full services banking" antara lain dengan menciptakan sarana bisnis yang lebih canggih dalam rangka melaksanakan strategi ekspor. Kita harus mengakui bahwa masih banyak kendala yang harus diatasi yang selama ini dapat dilihat sebagai penghambat perkembangan sarana bisnis. Bila dalam 20-25 tahun mendatang kita ingin mencapai target ekspor non-migas, katakan, bernilai US\$30 milyar, atau dengan kata lain kita ingin menjamin penghasilan devisa kita demi kelangsungan pembangunan dan perkembangan perekonomian na-

sional, maka kendala-kendala yang bersifat ekonomi, politik, dan sosiologis sekalipun harus dilihat dari kacamata kepentingan nasional dan perspektif jangka panjang. Mungkin kendala-kendala tersebut tampak kurang menentukan dan dominan, sehingga tidak perlu diambil langkah-langkah "pengamanan," tetapi untuk melaksanakan konsep "full services banking" dengan berhasil diperlukan keputusan/kebijaksanaan yang lebih mendasar dan membutuhkan *political courage*. Untuk kepentingan nasional dan pembangunan negara, kita semua wajib mempelajari dan memberikan dukungan dan komitmen agar penerapan konsep tersebut menjadi salah satu dari misi nasional kita. Di dunia internasional, perbankan internasional dan lain-lain lembaga keuangan yang bergiat secara internasional dilihat sebagai akselerator dan pemain-pemain/aktor yang efektif dalam rangka mewujudkan suatu global ekonomi. Teknologi seperti telematik dan sebagainya dilihat sebagai "super highway" yang akan menghubungkan global economy itu. Dewasa ini proses kombinasi antara bank komersial/investasi dan lembaga-lembaga seperti perusahaan sekuriti dan "brokerage" mulai tampak dan bilamana ini berkembang terus maka tekanan akan lebih banyak kepada ikut serta dalam bentuk ekuiti daripada utang, atau kombinasi. Maka sudah perlu dipikirkan pembentukan semacam "Trust Fund." Thailand sudah membentuk "Thailand Trust Fund." Pembentukan "Indonesian Trust Fund" hendaknya dipelajari.



BUKU-BUKU TERBITAN CSIS

Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti,
lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum.

SEKAR SEMERBAK:

Kenangan untuk Ali MOERTOPO

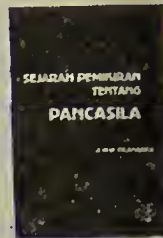
ix + 341 hal., @ Rp 5.000,00



Buku ini merupakan peringatan satu tahun wafatnya Ali Moertopo. Isinya meliputi berbagai hal yang diperkirakan menjadi minat almarhum semasa hidupnya, yang ditulis oleh Toeti Adhitama, F.R. Dalrymple, Derak Davies, Sukamdani S. Gitosardjono, Michael Laifer, Alajandro Melchor Jr., Goenawan Mohamad, David Newsom, A.R. Ramly, Robert A. Scalapino, Sabam Siagian, A.R. Soehoed, Soemitro, Soerjadi, Juwono Sudarsono, G. Sugiharto, H.N. Sumual, Sayidiman Suryohadiprojo, Abdurachman Suryomihardjo, Gaorga K. Tanham, Abdul Gafur, Harry Tjan Silalahi.

SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG PANCASILA

A.M.W. PRANARKA, xi + 509 hal., @ Rp 7.500,00



Disartasi ini diterbitkan karena mempunyai relevansi di bidang epistemologi dan ideologi. Perkembangan pemikiran mengenai Pancasila dewasa ini akhirnya memerlukan adanya penataan apistamologis, sehingga perkembangan pemikiran mengenai Pancasila melalui berbagai jalur dan berbagai pendekatan itu akan terja dalam suasana "rukun-patut-laras" tanpa terjarumus ke dalam subjektivisme, dogmatisme atau aklaktisme. Buku ini ju membarkan dokumentasi yang lengkap mengenai pemikiran dan pengkajian tentang Pancasila dan akan sangat bergu bagi usaha-usaha pendalaman selanjutnya.

Masih Tersedia:

1. PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA, Cet. ke-7, 1984 xviii + 96 hal., edisi HVS @ Rp 1.200,00, edisi biasa @ Rp 600,00
2. PANCASILA ARTI DAN PELAKSANAANNYA, Kirdi OIPOYUDO, Cet. ke-2, x + 124 hal., @ Rp 1.750,00
3. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, Ali MOERTOPO, Cet. ke-2, 1982, xxii + 296 hal., @ Rp 4.000,00
4. STRATEGI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: INDONESIA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK, Penyunting: Hadi SOESASTRO dan A.R. SUTOPO, 1981, xxiv + 640 hal., @ Rp 7.000,00
5. PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM BISNIS INTERNASIONAL, J. PANGLAYKIM, 1983, xii + 348 hal., @ Rp 3.500,00
6. GOLKAR: FUNCTIONAL GROUP POLITICS IN INOONESIA, Julian M. BOILEAU, 1983, viii + 140 hal., @ Rp 2.250,00

7. AFRIKA DALAM PERGOLAKAN-2, Kirdi DIPOYUDO, 1983, xiv + 208 @ Rp 2.750,00
8. ENERGI DAN PEMERATAAN, Hadi SOESASTRO at al., 1983, viii + 289 @ Rp 3.500,00
9. PACIFIC ECONOMIC COOPERATION: THE NEXT PHASE, editor: SOESASTRO dan HAN Sung-joo, 1983, xiv + 302 hal., @ Rp 3.750,00
10. PEACE AND SECURITY IN THE ATLANTIC AND PACIFIC REGIONS, x + 293 hal., @ Rp 3.750,00
11. ISSUES FOR PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, 1983, vi + 142 Rp 4.250,00
12. REGIONAL DIMENSIONS OF INOONESIA-AUSTRALIA RELATIONS, viii + 124 hal., @ Rp 2.000,00
13. INTERNAL DEVELOPMENTS IN JAPAN AND INDONESIA, 1985, x + 96 @ Rp 1.500,00

TERBITAN BERKALA:

ANALISA:

Terbit setiap bulan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, @ Rp 750,00. Langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,00 sudah termasuk ongkos kirim, untuk mahasiswa Rp 5.750,00/tahun. Masih tersedia nomor-nomor lepas dari yang sudah terbit.

- 1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA
- 2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- 3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV
- 4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN HUBUNGAN INDONESIA-VIETNAM
- 5/1984: PENGOIKAN DAN BEBERAPA TANTANGANNYA
- 6/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- 7/1984: OAMPAK HUBUNGAN TIMOR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- 8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI
- 9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- 10/1984: MEMBANGUN PEDESAAN

SERI DOKUMENTASI:

Kumpulan clipping berbagai surat kabar dan bulletin, dengan berbagai subjek dan masalah baik dalam negeri maupun internasional. Nomor-nomor terbaru antara lain:

1. PRA-INTEGRASI TIMOR TIMUR 1975 (67/P/XI/1983), xv + 225 hal., Rp 9.000,00
2. INTEGRASI TIMOR TIMUR 1975 (I), (68/P/XI/1983), xi + 156 hal., Rp 6.500,00
3. INTEGRASI TIMOR TIMUR 1976 (II), (69/P/XI/1983), ix + 111 hal., Rp 5.000,00
4. MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian I), (70/P/III/1984), v + 105 hal., Rp 4.750,00
5. MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian II), (71/P/III/1984), xiv + 158 hal., Rp 8.500,00
6. DIPLOMASI TENTANG TIMOR TIMUR (72/P/III/1984), ix + 148 hal., Rp 5.750,00
7. PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR 1977-1982 (73/P/III/1984), v + 115 hal., Rp 5.000,00
8. PAKET 1 JUNI 1983 (74/E/IV/1984), x + 199 hal., Rp 8.000,00
9. KOMINOK 1, JAKARTA 1984 (75/P/V/1984), xiii + 178 hal., Rp 7.500,00
10. HUBUNGAN RI-UNI SOVIET 5 TAHUN TERAKHIR (1980-1984), (76/HI/VIII/1984), xiv + 208 hal., Rp 8.500,00
11. GERAKAN WAJIB BELAJAR (77/PO/IX/1984), ix + 169 hal., Rp 8.500,00

- 11/1984: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA
- 12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA

- 1/1985: MASALAH EKONOMI YANG RUMIT DAN PEMECAHANNYA
- 2/1985: PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK INDONESIA
- 3/1985: MENGGALAKKAN KEGIATAN EKONOMI
- 4/1985: ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN
- 5/1985: PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
- 6/1985: MENGGALAKKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENE
- 7/1985: MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN
- 8/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: POLITIK NEGERI
- 9/1985: EMPAT PULUH TAHUN INDONESIA MERDEKA: IDEOLOGI DAN EKONOMI

12. ASAS TUNGGAL (78/P/II/1985), viii + 166 hal., Rp 7.000,00
13. MONOPOLI DAN OLIGOPOLI (79/E/III/1985), ii + 58 hal., Rp 3.000,00
14. UNIVERSITAS TERBUKA (80/PD/III/1985), vii + 168 hal., Rp 6.750,00
15. ORDE BARU (81/P/IV/1985), viii + 203 hal., Rp 8.250,00
16. KONFLIK KAMBOJA I (I), (82/HI/V/1985), ix + 186 hal., Rp 8.000,00
17. KONFLIK KAMBOJA II (II), (83/HI/V/1985), xvii + 287 hal., Rp 11.000,00
18. PEMILU AMERIKA SERIKAT 1984 (84/HI/V/1985), xiii + 232 hal., Rp 8.250,00
19. INPRES NO. 4, 1985 (85/E/VI/1985), xv + 247 hal., Rp 10.000,00
20. PERINGATAN 30 TAHUN KAA (86/P/VII/1985), xiv + 290 hal., Rp 11.000,00
21. RI-RRC (87/E/VII/1985), xiii + 194 hal., Rp 8.250,00
22. PEMBAJAKAN UOARA (88/HI/VII/1985), xi + 149 hal., Rp 5.250,00
23. TIMOR TIMUR 1983 (89/P/VII/1985), xiii + 179 hal., Rp 7.500,00
24. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-1), (90/P/VIII/1985), ix + 169 hal., Rp 8.500,00
25. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-2), (91/P/VIII/1985), viii + 124 hal., Rp 5.250,00
26. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-3), (92/P/VIII/1985), ix + 169 hal., Rp 8.500,00

Pesanan ditambah ongkos kirim \pm 15% ke: BIRO PUBLIKASI CSIS, Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telp. 356532, 356533, 355534, 355535



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.



ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—



THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—



DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analisis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35